



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 11
Telp. dan Fax. (0536) 3224547
Palangka Raya 73112
2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 selesai disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Kepala daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020. Berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diwajibkan menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan pedoman penyusunan dan mampu menggambarkan kinerja selama tahun 2020.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Palangka Raya, 16 Februari 2021

KEPALA DINAS,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Kondisi Kepegawaian	9
F. Isu – isu Strategis	13
G. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RPJMD Tahun 2016 – 2021	16
B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	18
C. Penetapan Kinerja Tahun 2020	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1 Meningkatnya Implementasi Pengarustamaan Gender	36
3.2 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Dan Pendapatan Keluarga	71
3.3 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	85
3.4 Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Termasuk TPPO	89
3.5 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	95
3.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak	100

3.7 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak	104
3.8 Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran	109
3.9 Menurunnya Angka Kelahiran.....	114
3.10 Meningkatnya Akseptor KB.....	120
3.11 Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	125
B. Realisasi Keuangan	133
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	163
B. Saran.....	164
LAMPIRAN	
A. Perjanjian kinerja tahun 2020	
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020	
C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	
D. Penghargaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	
E. Rencana Aksi Pertriwulan kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	
F. Rencana Aksi Semester kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	
G. Surat Reward dan Punishment	
H. SOP kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	
I. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	
J. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2019	

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I	
1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	9
1.2 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan	9
1.3 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan.....	10
1.4 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	10
1.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	11
1.6 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia	12
BAB II	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	20
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
2.3 Perjanjian Kinerja Utama Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	25
2.4 Penetapan Kinerja	29
2.5 Perjanjian Kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	31
BAB III	
3.1 Indikator Kinerja Sasaran 1	36
3.2 Program Kinerja ARG 2019	37
3.3 Program Kegiatan ARG Tahun 2020.....	58
3.4 Indikator Kinerja Sasaran 2	71
3.5 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan partai dan Jenis Kelamin.....	73
3.6 Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2014 – 2019.....	74
3.7 Data Indikator ID dan IPG Provinsi Kalimantan Tengah	79
3.8 Dimensi Pengukuran IPG	81
3.9 Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru	81
3.10 Dimensi Pengukuran IDG.....	83
3.11 Capaian IDG dan IPG 2014 - 2019	83
3.12 Indikator Sasaran 2	85
3.13 Indikator Kinerja Sasaran 4	89
3.14 Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 – 2020.....	91
3.15 Indikator Sasaran 5.....	95
3.16 Data Kekerasan Terhadap Anak 2018 - 2020 pada data SIMPONI KPPPA	99

3.17 Indikator Kinerja Sasaran 6	100
3.18 Indikator Kinerja Sasaran 7	104
3.19 Indikator Kinerja Sasaran 8	109
3.20 Indikator Kinerja Sasaran 9.....	114
3.21 Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD	116
3.22 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (tahun 2018-2020).....	116
3.23 Indikator Kinerja Sasaran 9	120
3.24 Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020	121
3.25 Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2019	122
3.26 Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018	124
3.27 Indikator Kinerja Sasaran 11	125
3.28 Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2020	127
3.29 Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2019	128
3.30 Kondisi BTL dan BL 2018 – 2019	133
3.31 Realisasi Belanja Langsung 2019 – 2020	134
3.32 Belanja Tidak Langsung (BTL) 2015 – 2020.....	161
3.33 Belanja Langsung (BL) 2015 – 2020.....	161
3.34 Realisasi Kegiatan dibawah 80%	162

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB I	
1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.....	8
BAB III	
3.1 Skema Pengukuran Kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020	35
3.2 Tingkatan Kabupaten Layak Anak	97

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan rencana kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2020. Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kedudukan peran strategis dalam melaksanakan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, yaitu Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah. Untuk itu seluruh program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada tujuan sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah "Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah". Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan adalah (1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, (2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak, (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta (4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, Kesebelas sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah realisasinya pada tahun 2020 mencapai **Persen** dengan pengukuran pada masing-masing **tujuan strategis** sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	3,00	0,97	32,33
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	28,89	31,58	100
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	33,41	33,36	99,85
Rata – rata capaian Tujuan					77,39%

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya kasus kekerasan	Rasio kekerasan terhadap	Rasio	0,0182	8,5097	100

terhadap perempuan termasuk TPPO	perempuan				
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	Persen	25	100	100
Rata – rata capaian Tujuan					100 %

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Persen	35,71	0	0
	Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0182	1,0083	100
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	100	100	100
Rata – rata capaian Tujuan					66,67%

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas data gender dan anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Persen	13,33	11,11	83,34
Rata – rata capaian Tujuan					83,4

Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+	B+	100%
Rata – rata capaian Tujuan					100%

Tujuan 6 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,26	2,24	97,76
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Anak	1	1	100
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,829	0,7985	90,58
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,02	11,31	50,66
Rata – rata capaian Tujuan					84,75%

Capaian Sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Pengarustamaan Gender	32,33
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	100
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap	99,85

No	Sasaran	Tingkat Capaian
	perempuan termasuk TPPO	
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	100
6	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus kepada anak	100
7	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	83,34
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100
9	Menurunnya angka kelahiran	97,76
10	Meningkatnya akseptor KB	100
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	90,58
	Rata-rata persentase Capaian Sasaran	91,26 %

Dalam hal anggaran, dukungan APBD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.788.314.369,- dengan alokasi sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK(%)
1.	Belanja Tidak Langsung	7.909.105.580	6.781.556.560	85,74	100
2.	Belanja Langsung	2.879.208.789	2.742.539.644	95,25	96,04
	Jumlah	10.788.314.369	9.524.096.204	88,28	98,94

Pencapaian kinerja input pada masing-masing Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
2.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.707.213.815	1.637.342.142	95,91
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.005.000	4.005.000	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	103.660.627	84.165.197	81,19
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103.406.800	89.136.368	86,20
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	220.500.800	205.673.250	93,28
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.780.000	44.391.00	99,13
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	11.997.00	99,97
10	Penyediaan alat tulis kantor	71.114.500	71.105.900	99,99
11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	35.000.000	35.000.000	100,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.500.000	21.612.000	88,21
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.762.000	21.674.000	99,60
17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	29.877.000	99,59
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.444.259	107.193.419	97,94
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	212.866.629	212.866.000	100,00
70	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	704.173.200	688.646.000	97,79
2.02-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000	40.000.000	100,00
10	Pengadaan Meubelair	0	0	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
31	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	25.000.000	25.000.000	100,00
194	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	5.000.000	5.000.000	100,00
2.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.841.000	71.006.195	93,63
1	Pendidikan dan pelatihan formal	2.600.000	2.600.000	100,00
36	Rapat koordinasi perencanaan	69.491.000	64.656.195	93,04
149	Peningkatan Kapasitas Sistem Perencanaan	3.750.000	3.750.000	100,00
2.02-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129.774.400	127.927.500	98,58
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.904.000	6.875.600	99,59
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	39.000.000	39.000.000	100,00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.500.000	8.475.500	99,71
6	Penyusunan RKA-SKPD	18.150.000	16.460.000	90,69
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	0
15	Penyusunan renja SKPD	16.466.500	16.466.500	100,00
55	Penyusunan Renstra SKPD	10.400.000	10.296.000	99,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
63	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	30.353.900	30.353.900	100,00
2.02-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	17.600.000	16.352.000	92,91
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	17.600.000	16.352.000	92,91
2.02-15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	406.888.164	355.949.340	87,48
5	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	34.800.000	31.900.000	91,67
10	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	0	0	0
20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi	0	0	0
24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	75.000.000	66.349.600	88,47
25	Rakornas Forum Anak Nasional	0	0	0
29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	0	0	0
30	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	50.923.764	50.923.764	100,00
31	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	0	0	0
40	Monev PUG di Daerah	1.429.000	1.429.000	100,00
44	Rapat Forum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0	0	0
45	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA Provinsi Kalimantan Tengah	170.000.000	130.611.576	76,83

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
46	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	74.735.400	74.735.400	100,00
2.02-16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	52.793.700	47.534.500	90,04
33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	52.793.700	47.534.500	90,04
42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	0	0	0
2.02-17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	84.424.710	84.318.180	99,87
26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	78.187.210	78.080.680	99,86
42	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	6.237.500	6.237.500	100,00
43	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	0	0	0
2.02-18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	162.241.400	160.737.600	99,07
7	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	72.717.600	72.717.600	100,00
25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	75.000.000	73.500.000	98,00
26	Capacity Building Bagi Perempuan	0	0	0
27	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	14.523.800	14.520.000	99,97
2.02-20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	48.910.100	48.910.100	100,00
23	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	30.510.100	30.510.100	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
24	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	18.400.000	18.400.000	100,00
26	Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	0	0	0
2.02-21	Program Penyusunan Profil Lembaga	55.650.000	55.650.000	100,00
9	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	37.200.000	37.200.000	100,00
10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	0	0	0
12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0	0	0
22	Pengembangan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	18.450.000	18.450.000	100,00
2.08-15	Program Keluarga Berencana	97.871.500	96.812.095	98,92
2	Pelayanan KIE	0	0	0
25	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	63.449.500	63.449.500	100,00
29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.599.100	18.589.695	94,85
34	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	14.822.900	14.772.900	99,66
35	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0	0	0
50	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana	0	0	0
53	Peningkatan Kapasitas Bina Ketahanan Remaja dalam Kesehatan Reproduksi Remaja	0	0	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2	3	5	6
	JUMLAH	2.879.208.789	2.742.539.644	95,25

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran harus lebih cermat agar tidak menghambat pencapaian kinerja *output* dan *outcome* dengan mempertimbangkan Program/Kegiatan prioritas.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif guna mendukung proses pelaksanaan pencapaian kinerja di bidang layanan masing-masing.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Melalui LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKIP).

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Formula kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.
13. pelaksanaan koordinasi pada dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mulai bergeser pada fungsi pelayanan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;

12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi.
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.
17. Melaksanakan fungsi Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Aspek Strategis

Berdasarkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, serta keselarasan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan visi *“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri Dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok, Religious, Kuat Amanah Dan Harmonis)”*. Dengan visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan tata kelola pemerintah daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya alam
8. Pengelolaan Pendapatan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi pemerintah daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan amanat untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari misi ke enam “Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di berbagai sektor.

D. Struktur Organisasi

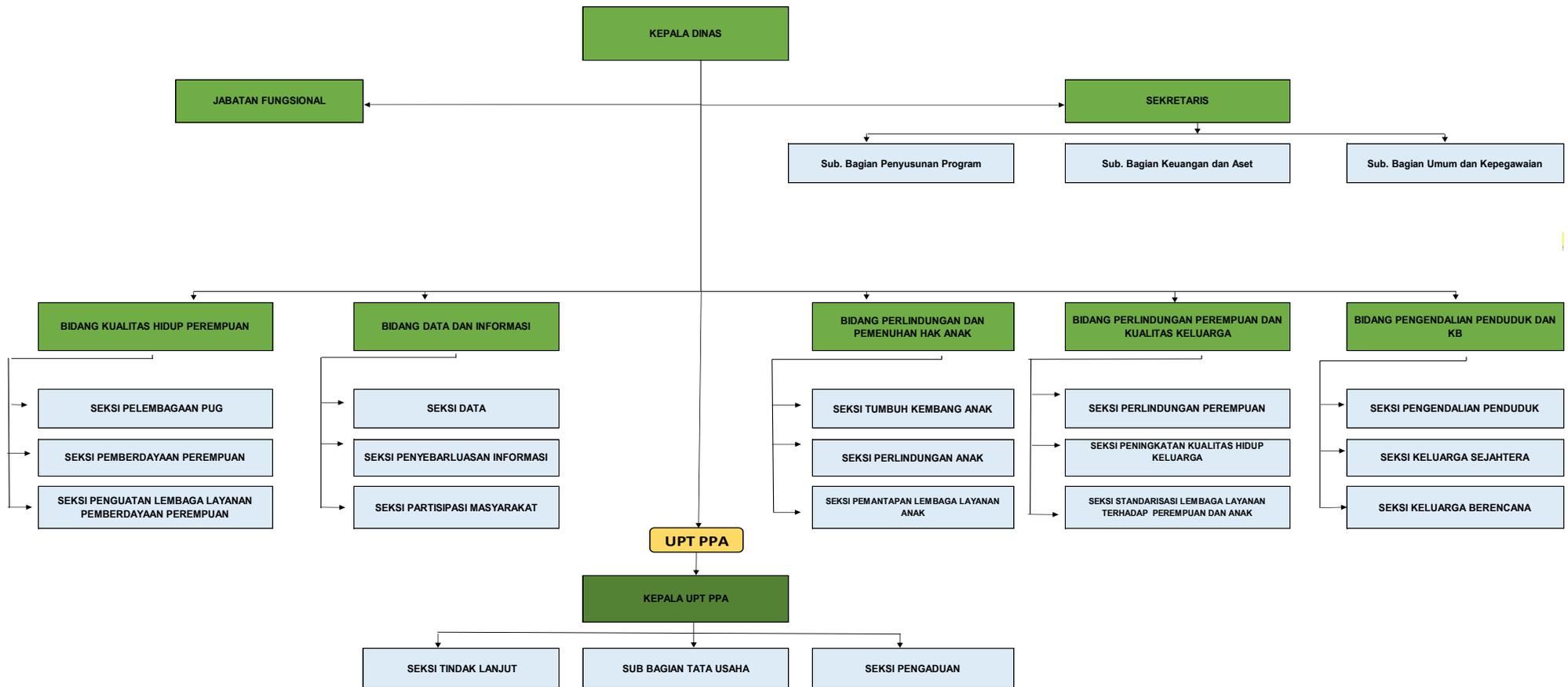
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelembagaan PUG
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Kepala Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Bidang Data dan Informasi, membawahi :

- 1) Kepala Seksi Data
 - 2) Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi
 - 3) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat
- c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
- 1) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan Anak
 - 3) Kepala Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi :
- 1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
 - 3) Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
- 1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.
 - 2) Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
 - 3) Kepala Seksi Keluarga Berencana
- f. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)
- 1) Seksi Tindak Lanjut
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Pengaduan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut pada gambar 1.1 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GAMBAR 1.1

E. Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per desember 2020 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	12	40	54
2.	Honorer	-	-	-
3.	PHL / Kontrak	13	10	23
Jumlah		25	50	75

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	6	11
2.	Golongan III	4	31	36
3.	Golongan II	4	3	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		12	40	52

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB
Provinsi Kalteng Tahun 2020

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN	0	0	0
2.	SLTP	0	0	0
3.	SLTA	4	7	14
4.	D3	0	4	5
5.	S1	4	19	25
6.	S2	3	5	8
7.	S3	-	1	1
Jumlah		13	39	52

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB
Provinsi Kalteng Tahun 2020

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	1	0	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	2	4	6
3.	Kasubbag / Kasubbid	Esselon IV	18	2	16	18
4.	Fungsional Tertentu /	Esselon V	3	1	2	3

	Arsiparis					
Jumlah		28	6	22	28	

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Dari data komposisi diatas bahwa ada kekosongan karena pension untuk jabatan Eselon III 2 (dua) orang dan Eselon III 2 (dua) orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	10
2.	Pembina Utama Madya	IV/b	1	0	0	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	0	0	0	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	1	5	6	
5.	Pembina	IV / a	2	1	3	
6.	Penata Tk. I	III / d	1	11	14	35
7.	Penata	III / c	1	8	4	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	2	8	12	
9.	Penata Muda	III / a	0	4	6	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	0	2	2	7
11.	Pengatur	II / c	2	-	2	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	1	3	
13.	Pengatur muda	II / a	2	0	0	0
14.	Juru Tk. I	I / d	0	0	0	
15.	Juru	I / c	0	0	0	

16.	Juru muda TK. I	I/b	0	0	0	
	Juru Muda	I/a	0	0	0	
Jumlah			12	40	52	52

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Komposisi jumlah PNS tahun 2020 sebanyak 52 orang, dari jumlah PNS tersebut sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 10 orang ,Golongan III 35 orang dan golongan II 7 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III sebanyak 35 orang sebesar 67,21 %. Dimana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah)

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Usia

No	Umur	Tahun 2020				Jumlah	%	Ket
		L	%	P	%			
1.	< 30 Tahun	0	0	0	0	0	0	Produktif
2.	30 – 39 Tahun	3	5,77	11	21,15	14	26,92	26,92 %
3.	40 – 49 Tahun	4	7,69	12	23,08	16	30,77	Umum 30,77 %
4.	≥ 50 tahun	5	9,62	17	32,69	22	42,31	Kurang Produktif 42,31 %
Jumlah		12	23,08	40	76,92	52	100	

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2020

Dengan memperhatikan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PNS yang usia produktif (< 40 tahun) tergolong minim atau sebesar 30,77 %, justru sebagian besar PNS berada pada kondisi usia kurang produktif (\geq 50 tahun) sebesar 42,31 % dan sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat PNS yang akan memasuki Pensiun sebanyak 2 orang.

Kondisi ideal adalah seperti bentuk piramida, dimana Jumlah PNS termasuk dalam katagori produktif harus lebih banyak untuk menunjang produktivitas kerja, dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS dalam usia produktif < 40 tahun sebesar 26,92 % atau sebanyak 14 orang.
- PNS yang berusia 40 – 49 tahun sebesar 330,77 % atau sebanyak 16 orang.
- PNS dalam katagori kurang produktif (> 50 tahun) sebesar 42,31 % atau sebanyak 22 orang.

F. Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak

kekerasan, termasuk TPPO

c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

2. Perlindungan Anak :

a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup

b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya

c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor Keluarga Berencana
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi pelindung anak-anak untuk berkembang

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan

Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Aspek Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2020 meliputi RPJMD 2016 – 2021, RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 dan penetapan kinerja tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD tahun 2016 – 2021
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

A. RPJMD Tahun 2016 – 2021

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis SKPD.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan

- kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;
- e. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
 - f. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021;
 - g. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
 - h. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 4 aspek yang menjadi gambaran umum kondisi daerah. Antara lain :

1. Aspek Geografis dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan ke 4 (empat) aspek tersebut perencanaan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masuk kedalam Aspek Pelayanan Umum pada “fokus pelayanan urusan wajib (non pelayanan dasar) “ bagian pemberdayaan perempuan dimana dijelaskan Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks

Pemberdayaan Gender). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin. Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

“Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 4 (empat) Misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Peformulaan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 diformulakan sebagai berikut :

- Tujuan 1* Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- Tujuan 2* Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- Tujuan 3* Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
- Tujuan 4* Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- Tujuan5* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tujuan 6* Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Sasaran

Berdasarkan peformulaan tujuan, maka diformulakan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai tahunan selama periode Renstra. Peformulaan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
		Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
			Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
3.	Meningkatkan	Berkurangnya	Persentase

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	kasus kekerasan terhadap anak	Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
			Rasio anak korban kekerasan
		Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS Rata-rata jumlah anak per Keluarga
		Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi
		Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMD 2016 - 2021.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal *business process* (peningkatan kapasitas jaringan internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 - 2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
Rasio anak korban kekerasan		

SEKTOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar
	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP (skor)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga
	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi
	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

Tabel 2. 3

Perjanjian Kinerja Utama Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
NIP : 19630527 199102 1 001
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

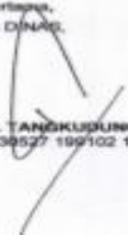
Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112 Telp. 0536 - 3224547	
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
Unit	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tugas dan Fungsi	Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi : <ol style="list-style-type: none">Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusuteraan gender dan pemberdayaan perempuan;Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;Penyelenggaraan urusan kesekretariatian Dinas; danPelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

No.	Besaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dibagi Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dikali 100	DINAS PSAPPRO, BAPPEDA/Bang. BRAD
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan partisipasi keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Jumlah Perempuan di lembaga legislatif (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) dikali 100	DINAS PSAPPRO, BPS, Sekretariat DPRD
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Jumlah Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga dibagi Total Pendapatan) dikali 100	DINAS PSAPPRO, BPS
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPD	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan) dikali 1000	DINAS PSAPPRO (LPT-PPA)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPD	Persentase perempuan korban kekerasan yang layani sesuai dengan standar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang dilayani sesuai Standar dibagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan) dikali 100	DINAS PSAPPRO (LPT-PPA)
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori prima	Jumlah Kab./Kota Layak Anak dibagi Jumlah Kab./Kota) dikali 100	DINAS PSAPPRO
		Rasio anak korban kekerasan	Jumlah Anak Korban Kekerasan dibagi Jumlah Anak) dikali 1000	DINAS PSAPPRO (LPT-PPA)
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah Anak Korban	DINAS PSAPPRO (LPT-PPA)

No.	Basaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
			Kelahiran dibagi 100	
7.	Meningkatnya kualitas data pihak gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD dibagi 100	DINAS PSAPPEB
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengapuran program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	-	Inspektoral, Biro Organisasi
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan setiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi	BPS, BKKBN
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	BPS, BKKBN
10.	Meningkatnya akseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama	BPS, BKKBN
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	(Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin merencanakan kehamilan dikurangi dengan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi) dibagi Total Jumlah PUS dikali 100	BPS, BKKBN

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

dr. ADM. TANOKUDUNG, M.Kes
NIP. 196305271961021001

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 dan surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/321/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi

Penetapan kinerja SKPD yang telah sepakati pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,57
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	38,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,36
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0123
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	25
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	35,71
		Rasio anak korban kekerasan	0,0213
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	25
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	11,11

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B+
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,28
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,815
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,51

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

solaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,00
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	persen	26,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,41
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0182
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	36,71
		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0182
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	13,33
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	9+ / 88
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,26
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,829
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	17,02

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.241.525.799	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	90.500.000	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Rp.	22.650.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	430.874.600	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	290.830.480	
6.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp.	1.837.555.171	
7.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	131.801.375	
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	300.514.700	
9.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp.	401.738.125	
10.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Rp.	240.636.000	
11.	Program Penyusunan Profil Lembaga	Rp.	333.872.200	
12.	Program Keluarga Berencana	Rp.	394.218.875	

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua, GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	Pihak Pertama, KEPALA DINAS,
---	---------------------------------

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630827 199102 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan syarat dalam melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian di analisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil maka akan dijadikan dasar dalam penetapan target tahun berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, Tengah telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang akan dicapai. Ke sebelas sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis akan dilihat capaian kinerjanya yang kemudian akan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan ataupun penurunan kinerja yang kemudian dibandingkan dengan target pada periode akhir masa RENSTRA.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Kinerja 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2020 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing-masing indikator kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis pada RENSTRA 2016 – 2021.

Adapun Skema pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

SKEMA PENGUKURAN KINERJA DINAS DP3APPKB PROVINSI TAHUN 2020



Gambar 3.1

SKEMA PENGUKURAN KINERJA DINAS DP3APPKB

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan akan disimpulkan apakah berhasil atau belum berhasil masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Data dan informasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

3.1. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender

Yang menjadi tolak ukur capaian sasaran meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari satu indikator yaitu Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng/ Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dikali 100	2,57	4,8	188	3,00	2,3	76,67

Dari data tolak ukur capaian sasaran meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari satu indikator persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng, dimana Jumlah Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebesar 2.210.779.958.177,32 dan Jumlah Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebesar 2.897.793.581.700. Untuk Jumlah Analisis Reponsif Gender pada Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 sebesar 54.523.881.958 dari 23 Program dan 55 kegiatan, dan pada tahun 2019 sebesar 125.508.338.976 dari 68 Program dan 127 Kegiatan . Untuk Target pada tahun 2019 sebesar 2,57 % atau sebesar 66.467.490.705, target pada 2020 sebesar 3,00 atau sebesar 70.700.858,97. Untuk realisasi pada tahun 2020 dengan perhitungan $(54.523.881.958 / 2.356.695.299) * 100 = 2,3 \%$, sedangkan realisasi pada tahun 2019 dengan perhitungan $(125.508.338.976 / 2.586.283.685) * 100 = 4,8 \%$. Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2020 dengan perhitungan $(2,3 / 3,00) * 100 = 76,67 \%$, sedangkan Capaian Indikator kinerja pada tahun 2019 dengan perhitungan $(4,85 / 2,57) * 100 = 188 \%$.

Untuk indikator sasaran Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender terdiri dari satu indikator persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng pada tahun 2019 mencapai target 188% dengan dukungan anggaran pada dana APBD tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan 76,67 % dana yang ada di perangkat daerah yang dirasionalisasi di fokuskan pada pandemi covid-19 sehingga pada tahun 2020 tidak mencapai target.

Daftar perangkat daerah beserta program dan kegiatan yang ARG pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program Kegiatan ARG Tahun 2019

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	DPRD Prov Kalteng	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Responsif Gender	Rp.45.000.000
2	RSUD dr. Doris Slyvanus	Peningkatan mutu rumah sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Rp.1.389.000.000
			Peningkatan Mutu Pelayanan	Rp.8.100.000.000
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Sosialisasi STOP Peti	Rp.378.705.000
		Pengembangan listrik dan pemanfaatan energi	Verifikasi desa belum berlistrik untuk mendukung	Rp.385.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			rasio elektrifikasi di kalteng	
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemberdayaan Putri Pariwisata	Meningkatnya Peran putri pariwisata dalam promosi pariwisata dan budaya	Rp.2.437.100.000
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendayagunaan dan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja anak	Rp.211.750.000-
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan berbahan buah-buahan	Rp.65.000.000-
			Pelatihan Petugas Pemantau Harga Bahan Pokok se-kalimantan tengah	Rp.50.000.000
		Pengembangan industry kecil Menengah (IKM)	Bimbingan teknik Produk Kerajinan dari	Rp.60.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Limbah Kayu di Kota P. raya	
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi publik	Forum PTSP Se-Kalteng	Rp.150.000.000
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pelatihan Kreativitas Pemuda	Rp.200.000.000
9	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	Pelayanan Operasi Katarak	Rp.630.000.000
			Pelayanan Kesehatan Lapangan	Rp.472.500.000
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Lomba Balita dan kampanye pecan ASI	RP.551.775.000
			Penanggulangan masalah perbaikan gizi (under weight) dan masalah gizi stunting pendek dan sangat pendek.	Rp.157.500.000
			Pembinaan Surveilans Gizi	Rp.210.000.000-
			Pencegahan dan	Mobile VCT

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		penanggulangan penyakit menular	Pertemuan evaluasi program penanggulangan masalah kesehatan	Rp.50.000.000-
			Pengadaan insektisida dan larvasida	Rp.215.000.000-
			Mass Blood Surviys (MBS)	Rp.367.000.000-
			Supervisi Manajemen Pengendalian Hdisp (Hepatitis, Diare, Infeksi Saluran Pencernaan) dan ISPA Imunisasi	Rp.131.250.000-
			Penguatan Penemuan dan Penanganan Kasus TB Paru dan Kusta	Rp.157.500.000-
			Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Rp.100.000.000-
			Koordinasi	Rp.168.000.000

NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Kampanye measles Rubella dengan LP/LS terkait Provinsi	
			Orientasi Antenatal care (ANC) terpadu dalam rangka penguatan pelaksanaan Triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis) dari Ibu dan anak	Rp.76.000.000-
			Sosialisasi Gerakan satu rumah dan jumatir	Rp.200.000.000-
		Pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dan anak	Bimtek dalam penanganan gangguan tumbuh kembang	Rp.157.000.000
			Monitoring evaluasi terpadu angka kematian ibu, Neonatal , bayi dan anak balita	Rp.173.250.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
10	Biro Hukum	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembinaan Non PNS	Rp.5.381.520.000
		Peningkatan Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Rp..1.277.250.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi peraturan perundang – undangan	Rp.75.000.000
11	Biro Organisasi	Penataan Kelembagaan dan ketata laksanaan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalteng	Rp.172.000.000
12	Satpol PP	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pergub	Penyuluhan penegakkan PERDA	Rp.200.000.000
13	Biro Administrasi Pembangunan			
14	Dinas P3APPKB	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi dan Kab/kota	Rp.120.000.000

NO .	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penyusunan Anggaran Resfonsif Gender	Rp.54.199.000
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Rp.150.000.000
		Keluarga Berencana	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran pada Masyarakat Kabupaten/kota	Rp.55.365.500
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui GSI	Rp.60.000.000
		Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten dan Kota Se Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.57.971.250

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Monitoring dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Rp.104.504.150
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Nasional	Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan	Diklat Teknis Sosialisasi dan Penyuluhan Perpustakaan	Rp.120.000.000
16	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Koordinasi Penilaian Sekolah adi wiyata	Rp.350.000.000
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan Kedinasan	Pendidikan Kesenjangan struktural	Rp1.694.200.000 -
18	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM	Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi anggota koperasi	Rp.500.000.000
		Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi wirausaha baru	Rp.350.000.000
19	Dinas Komunikasi, Informatika, persandian	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelatihan Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi dan	Rp.200.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	dan statistic		Informasi melalui Pusat Komunikasi Kreatif bagi UMKM	
20	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan CAPRA IPDN	Rp.120.000.000-
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan Politik Masyarakat	Sarasehan Peningkatan wawasan politik Perempuan	Rp.69.724.935
22	Dinas Perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Koordinasi, Sinkronisasi ,Falidasi data StatistikPerkebunan di Kab /Kota Se- Kalteng	Rp.421.800.000
23	Biro Hukum	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Rp.216.000.000
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM	Rp.76.320.000
24	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan	Rp.150.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			ekonomi keluarga	
		Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintah desa	Rp.150.000.000
25	Biro Administrasi Pembangunan	Tidak ada Program dan kegiatan yang khusus terkait ARG	-	-
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Nilai Budaya	Gita Bahan Nusantara	Rp.75.000.000
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemberdayaan Putri Pariwisata Kalteng	Rp.75.000.000
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	Pelatihan Diversifikasi Produk anyaman Rotan di Barito Utara	Rp.70.000.000
		-	Pelatihan Petugas	Rp.50.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Pemantau harga bahan Pokok Se-kalimantan Tengah	
28	Badan Keuangan dan asset Daerah	Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab/kota	Sosialisasi Peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD PROV Kalteng	Rp.385.000.000
29	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan Setda Propinsi Kalimantan Tengah	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Pembinaan Pemuda/ Remaja Antar Agama	Rp.200.000.000
30	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan Kawasan Sentra Agibisnis Pertanian Hortikultura Percepatan Kalteng Sejahtera	Rp.3.550.000.000
			Pengembangan	

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Kawasan Pernakan Percepatan Kalteng Sejahtera	Rp.1.505.000.00 0
31	Dinas Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp 155.000.000
32	Dinas Sosial	Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR	Rp.1.441.000.00 0
33	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengembang an	Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi Perencanaan Penanggulanga n Kemiskinan Daerah	Rp. 372.000.000
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan daya saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	Pengembangan usaha Pengolahan Perikanan skala kecil	Rp.423.695.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir	Adopsi teknologi dan pembelajaran ke pengrajin / komunitas pengolah limbah hasil perikanan	Rp.64.316.400
			Pembinaan kelompok wanita pengolah limbah hasil perikanan dikawasan wisata desa ujung pandaran	Rp.33.640.000
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Bencana	Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaen/kota	Rp.200.000.000
			Pembentukan Lembaga Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Kalimantan Tengah	Rp.125.000.000
36	Biro ADM Kesra dan Kemasyarakatan	Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Pembinaan Pemuda/ Remaja antar	Rp.175.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	an SETDA		Agama	
37	Dinas Perkimtan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.6.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp.420.000.000
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Rp.80.000.000
			Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasiona l	Rp.250.000.000
			Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Rp.2.645.447.50 0
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.69.989.000
			Penyediaan Alat tulis kantor	Rp80.000.000
			Penyediaan barang cetakan dan	Rp80.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penggandaan	
			Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.20.000.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.1.664.373.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.40.000.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Rp.90.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.626.769.891
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp.300.000.000
			Penyediaan jasa informasi public dan website	Rp.10.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			perangkat daerah	
			Pembinaan kesehatan jasmani aparatur	Rp.39.000.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp.3.062.408.000
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.306.400.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp.50.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Rp.120.000.000
			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.69.180.000
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rp.5.128.290.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta	Rp.91.670.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			perlengkapannya	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp.138.000.000
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp.99.842.000
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp.100.000.000
			Bimbingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan konstruksi	Rp.99.929.000
		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.149.922.000
			Penyusunan pelaporan keuangan dan aset	Rp.30.000.000
			Pelaksanaan repormasi birokrasi	Rp.86.607.000
			Penyusunan	Rp.200.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			dokumen perencanaan dan penganggaran SOPD	
			Ekspose hasil-hasil pembangunan bidang	Rp.549.283.500
		Program peningkatan pengembangan pengelolaan asset/barang daerah	Pengelolaan Inventaris barang daerah	Rp.100.000.000
		Program lingkungan sehat perumahan	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Rp.580.721.350
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan dan pencegahan penurunan kualitas insfrastruktur pemukiman perdesaan	Rp31.237.468.00 0
		Program pembangunan dan peningkatan kualitas kawasan	Pengembangan pengendalian kualitas kawasan	Rp33.493.556.50 0

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		permukiman perkotaan	permukiman perkotaan	
			Appraisal survey dan pengukuran	Rp.250.000.000
			Perencanaan dan pendataan bidang kawasan permukiman	Rp.993.816.000
			Penataan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan	Rp.560.080.000
		Program penataan ,penguasaan ,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah	Interventarisasi dan verifikasi ketersediaan lahan untuk PSU	Rp.415.782.500
			Penataan administrasi pertanahan	Rp.50.000.000
		Program peningkatan sumberdaya manusia(SDM) bidang pertanahan	Bimbingan teknis,koordinasi ,konsultasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat(kementeri an PUPR), pemerintah kab/kota yang menangani	Rp.300.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			bidang pertanahan	
		Program pembiayaan perumahan	Rakernis pembiayaan perumahan	Rp.165.000.000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp.115.000.000
			Diseminasi pembiayaan perumahan	Rp.115.000.000
		Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Disiminasi pengadaan tanah 73ang anti kerugian untuk pembangunan	Rp.160.500.000
			Perencanaan pengadaan tanah untuk penataan flamboyant bawah	-
		Program penyelesaian permasalahan pertanahan	Inventarisasi data permasalahan pertanahan	Rp.124.000.000
			Rapat koordinasi penanganan	Rp.160.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			sengketa tanah	
		Program penatausahaan pertanahan	Inventarisasi penguasaan,pe milikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp.390.000.000
			Rapat kerja teknis pendaftaran tanah	Rp.472.000.000
		Program pengaturan bidang pertanahan	Penyusunan kebijakan daerah bidang pertanahan	Rp.248.717.500
			Rapat koordinasi bidang pertanahan	Rp.168.000.000
38	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	Nihil	Nihil	Nihil
39	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dan Gizi keluarga	Pemanfaatan lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga	Rp.10.000.000
			Sosialisasi diversifikasi	Rp. 50.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			pangan bagi ibu- ibu kelompok tani, PKK	
			Lomba cipta menu B2SA tingkat Provinsi/Nasiona l	Rp.175.000.000
Jumlah		68 Program	127 kegiatan	125.508.338.976

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.3

Program Kegiatan ARG Tahun 2020

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Penyuluhan Sosial	Rp. 894.230.000
2	Badan Pengembang an SDM	Program Pendidikan kedinasan	Pendidikan Penjenjangan struktural	Rp.1.694.200.00 0
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelatihan Kejuruan Prosesing Pertanian	Rp. 60.000.000
4	Dinas	-	Bintek	Rp.487.043.800

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
	Koperasi dan UKM		Kewirausahaan bagi wira usaha baru	
		-	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah	Rp. 20.000.000
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab/kota	Sosialisasi Peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD se- kalimantan	Rp. 385.000.000
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan	Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil	Rp. 600.000.000
8	Dinas Perkimtan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.7.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.500.000.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp.250.000.000
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.3.500.000.000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.150.000.000
			Penyediaan alat tulis kantor	Rp.100.000.000
			Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Rp.92.450.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.50.000.000
			Penyediaan peralatan dan	Rp.170.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			perlengkapan kantor	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.50.000.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Rp.75.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.300.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp.187.500.000
			Penyediaan jasa informasi public dan website perangkat daerah	Rp.150.000.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	RP.147.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp.100.000.000
			Pemeliharaan	Rp.80.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l	
		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Pembinaan Kesehatan Jasmani/Aparatu r	Rp.50.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.100.000.000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset	Rp.25.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Panganggaran SOPD	Rp.138.954.500
			Ekspose hasil- hasil Pembangunan Bidang	Rp.500.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan	Pengelolaan Inventaris	Rp.100.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Pengelolaan asset/Barang Daerah	Barang Daerah	
		Program Pengembangan Perumahan	Koordinasi Penyelenggaraa n Pengembangan Perumahan	Rp.50.000.000
			Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman	Rp.500.000.000
			Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.246.651.250
			Pendataan Rumah tidak Layak Huni	Rp.650.000.000
			Koordinasi,Kons ultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lain Terkait Urusan Perumahan	Rp.100.000.000
			Penyulahan dan Pengawasan Kualitas	Rp.205.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Lingkungan Sehat Perumahan	
		Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan Untuk PSU	Rp.100.000.000
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan	Bimbingan Teknis,Koordina si,Konsultasi, dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Pemerintah kab/kota yang Menangani Bidang Pertanahan	Rp.100.000.000
		Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Inventarisasi data Permasalahan Pertanahan	Rp.50.000.000
		Program Penatausahaan Pertanahan	Rapat Kerja Teknis Pendaftaran Tanah	Rp.201.709.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
		Program Perencanaan Kawasan Permukiman	Appraisal Survey dan Pengukuran	Rp.250.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.704.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kawasan Permukiman	Rp.185.350.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.38.512.193.7 08
9	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan pengembangan sumberdaya aparatur	Seleksi penerimaan CAPRA IPDN	Rp.60.173.000
10	Dinas Kesehatan		Pertemuan Evaluasi Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	Rp.123.740.000
			Supervisi Manajemen	Rp.71.560.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Pengendalian Hepatitis, Diare, Inspeksi, Saluran Perencanaan dan Ispa, Imunisasi	
			Bintek dalam Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang	Rp. 77.840.000
			Pelayanan Operasi Katarak	Rp.509.650.000
			Pelayanan Kesehatan Lapangan	Rp.363.150.000
11	Bappedalitbang	Program Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rp. 351.000.000
			Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD-PG, GERMAS dan Pencegahan Stunting	Rp.200.000.000
			Kegiatan Dewan Riset Daerah	Rp.400.000.000

NO	NAMA SOPD	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5
			Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rp. 351.000.000
12	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Verifikasi desa Belum Berlistrik untuk Mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng	Rp. 300.000.000
13	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	-	-	Nihil
14	Biro Administrasi Pembanguna n	-	-	Tidak Terdapat Program /Kegiatan yang Khusus Terkait Anggaran Responsif Gender (ARG)
15	Dinas P3APPKB	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Rp.52.793.700
		23 Program	55 Kegiatan	Rp.54.523.881.9 58

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk indikator sasaran meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam indikator persentase ARG di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dibandingkan bahwa pada tahun 2019 ada 68 program dengan 167 kegiatan dengan anggaran sebesar 125.508.338.976. Sedangkan data pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya ada 23 program 55 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 54.423.881.958. Pada Belanja Langsung APBD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, disediakan anggaran pada dana APBD pada tahun 2020 untuk mendukung capaian indikator walaupun di masa pandemi covid-19 yang terbatas dianggarkan hanya satu kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) berjumlah 52.793.700 dana yang terpakai 47.534.500, dengan anggaran yang ada, masih ada dana dikembalikan ke negara sebesar 5.259.200. dengan capaian 76,67 %. Dengan kondisi pandemi covid 19 dengan capaian 76,76 % tidak mencapai target dan perlunya komitmen Perangkat Daerah mempunyai komitmen yang kuat terhadap Anggaran Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Tengah walaupun dimasa pandemi covid 19.

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Perlunya Komitmen yang kuat terhadap peraturan yang ada terhadap SOPD .
Karena ada Peraturan tentang PPRG di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Gubernur, dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Kelembagaan masih hanya sekedar membentuk kelompok kerja PUG tetapi untuk rencana dan laporan kelompok kerja sangat minim.
- c. Adanya Rasionalisasi anggaran yang dialihkan ke Covid 19 dan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak masuk ke dalam IKU SOPD
- d. Masih sangat kurang ketersediaan sumber daya manusia yang sudah mengikuti TOT, Fasilitator PUG dan PPRG . Dan minimnya anggaran dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
- e. profil gender dan data terpilah masih sangat kurang dan perlu diwajibkan membuat data terpilah sebagai informasi dalam menyusun program.
- f. Belum adanya regulasi teknis yang mendukung terintegrasinya perspektif gender

didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- g. Masih rendahnya komitmen para pemangku kebijakan di masing-masing lembaga di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahanan gender.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.
- b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;
- f. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran;
- g. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.
- h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG.
- b. Memperbanyak fasilitator di daerah agar penyusunan anggaran bisa dilaksanakan sampai pada tingkat kabupaten/kota, dan kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang responsif gender.
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan PUG khususnya bagi internal Dinas PP dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta SDM dari Perangkat Daerah strategis lainnya.
- d. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG bidang Politik, Sosial dan Hukum di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja;
- e. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG;
- f. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan PUG
- g. Penguatan Kelembagaan PUG melalui Pembentukan POKJA, gender focal point dan bentuk jejaring kerja lainnya
- h. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.
- i. Memotivasi kelompok kerja PUG yang sudah terbentuk agar menyusun rencana kerja tahunan dan membuat laporan kelompok kerja PUG

3.2 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Dan Pendapatan Keluarga

Dalam pencapaian meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dilihat dari table dibawah

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	2019			2020			Ket
			T	R	%	T	R	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	Jumlah perempuan di lembaga legislatif (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) dikali 100	28,89	31,58	100	28,89	35,55	100	Sumber Data : BPS Kalteng dalam angka 2020
Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	Jumlah Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga dibagi total pendapatan dikali 100	33,26	33,39	100	33,41	33,40	99,97	Sumber Data : BPS Kalteng dalam angka 2019

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk tolok ukur capaian sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terdiri dari 2 indikator yaitu :

Indikator : Persentase perempuan di lembaga legislative

Dimana Jumlah anggota legislatif laki-laki Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 laki-laki berjumlah 29 orang, sedangkan jumlah anggota legislatif perempuan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 Perempuan berjumlah 16 orang dan Realisasi indikator Persentase perempuan di lembaga legislative dengan perhitungan $(16/29)*100 = 55,17 \%$, untuk capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = $(55,17 / 55,17) * 100 = 100 \%$.

Pada tahun 2020 target yang ditetapkan 28,89% realisasinya 100%, jumlah anggota legislatif Provinsi Kalimantan Tengah perempuan berjumlah 16 orang dari total 45 orang anggota legislatif atau dengan perhitungan $(16 / 45) * 100 = 35,55 \%$ Pada tahun 2019 target yang ditetapkan 28,89 % realisasinya 100 % jumlah anggota Legislatif Provinsi Kalimantan Tengah Perempuan berjumlah 12 orang dari 45 orang legislative atau = $(12 / 45) * 100 = 26,67 \%$.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Tabel 3.5

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan partai dan Jenis Kelamin

NO.	NAMA PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Partai Nasional Demokrat	4	1	5
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2	4
3	Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan	7	5	12
4	Partai Golkar	4	3	7
5	Partai Gerindra	3	2	5
6	Partai Demokrat	5	1	6
7	Partai Amanat Nasional	1	1	2
8	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1
9	Partai Hanura	1	1	2
10	PKP Indonesia	1	-	1
Jumlah		29	16	45

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi

Kalimantan Tengah

Indikator : Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Pada tahun 2019 target yang ditetapkan 33,41 % realisasinya 33,40 % Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 mencapai 33,40 % dan realisasi berdasarkan target = $(33,41 / 33,41) * 100 = 100\%$

Pada Tahun 2018 target yang ditetapkan 33,26 % realisasinya realisasinya 100 %. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 33,26 % dan realisasi berdasarkan target = $(33,26 / 33,26) * 100 = 100\%$, kebutuhan partisipasi wanita sangat besar mengingat ditetapkannya model pembangunan yang berbasis pada masyarakat. wanita memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga dan sekaligus merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pria, maka sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di tingkat keluarga, indikator ini menjadi salah satu variabel pengukuran dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) pada dimensi "Kehidupan yang layak" IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 3.6

Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2014 – 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumbangan pendapatan perempuan (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Tengah	33.13	33.26	33.26	33.39	33,39	33,40
Kotawaringin Barat	23.02	23.21	-	23.55	23,69	23,93
Kotawaringin Timur	25.42	25.82	-	25.77	25,85	25,87
Kapuas	28.05	27.04	-	27.57	27,75	27,78
Barito Selatan	38.30	38.05	-	38.11	38,15	38,16

Barito Utara	42.72	43.72	-	43.73	43,71	43,76
Sukamara	18.61	19.07	-	19.47	19,74	19,98
Lamandau	25.72	27.71	-	27.81	27,87	27.90
Seruyan	26.01	26.62	-	26.98	27,07	27,12
Katingan	28.89	28.99	-	29.37	29,56	29,69
Pulang Pisau	22.15	22.48	-	22.94	23,15	23,18
Gunung Mas	55.83	51.33	-	51.04	50,11	49,83
Barito Timur	41.89	43.37	-	43.43	43,34	43,46
Murung Raya	28.83	29.39	-	29.35	29,34	29,37
Kota Palangka Raya	31.40	31.87	-	32.10	32,22	32,28

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB

Provinsi Kalimantan Tengah

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender guna meningkatnya partisipasi perempuan, antara lain adalah :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan gender.
- c. Terbangunnya kaukus perempuan, serta jejaring kemitraan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Implementasi kebijakan afirmatif terhadap perempuan belum sepenuhnya di tindak lanjuti.
- b. Budaya patriarki
- c. Masih rendahnya kualitas perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi

Tantangan / Hambatan

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek

diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga antara lain :

- a. Belum meratanya pemahaman tentang konsep gender strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
- b. Perbedaan gender yang terlihat dari kecenderungan peran masing masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumah tanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.
- c. Pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat.
- d. kultur budaya bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin, bahkan perempuan selalu menilai bahwa kebudayaan suku/etnis mempengaruhi kepartisipasiannya dalam politik bahkan segi kultur budaya pun perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu ayah ataupun suami. Perempuan lebih ditekankan kepada

- budaya yang melekat, yang mengatakan bahwa perempuan adalah pelayan bagi laki-laki serta perempuan tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik.
- e. Segi keluarga adalah masih terikat dengan adanya faktor budaya yang menyatakan perempuan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan suami/ayah karena perempuan dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga di dalam perempuan berpartisipasi.
 - f. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati. Inferioritas (rendah diri) akibat konstruk masyarakat juga menjadi hambatan perempuan dalam proses aktualisasi potensi dirinya. Kurang mampunya perempuan mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya. Sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki.
 - g. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya
 - h. Pembagian peran gender secara biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas konstruk budaya patriarkis. Interpretasi agama yang disalahartikan merupakan hambatan karir perempuan dalam politik, sehingga perempuan berpartisipasi di wilayah politik tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dirinya sendiri.
 - i. Motivasi dari para perempuan untuk lebih terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik masih rendah.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi perempuan perlu adanya dukungan dari semua pihak yang bersangkutan. Keterlibatan pemerintah, partai politik serta perempuan itu sendiri secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan merupakan langkah yang dapat diambil oleh setiap elemen yang terlibat demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Karena kebanyakan pendidikan politik yang diberikan saat ini terjadi ketika mendekati masa-masa pemilu. Hal ini yang kemudian menyebabkan kualitas para caleg terutama perempuan masih dibawah standard. Dengan diberikannya pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan diharapkan mampu memperbaiki kualitas dari perempuan itu sendiri, terutama di bidang politik. Dengan adanya peningkatan kualitas perempuan diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi wakil rakyat tidak kalah dari laki-laki.
- b. Diperlukan pendekatan pemahaman kepada laki-laki terutama dalam keluarga dalam memahami peran dan posisi perempuan dalam membantu ekonomi keluarga.

Dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimanta Tengah yang merupakan Indikator dalam pencapaian Kinerja RPJM, dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.7

Data Indikator ID dan IPG Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2018		2019		
		T	R	T	R	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,86	79,36	79,67	83,20	Sumber data : BPS <u>Formula :</u> $1/3[Xede(1)+Xede(2)+Linc-Dist]$ Xede(1)=Xede untuk

						harapan hidup Xede(2)=Xede untuk pendidikan Linch-Dist=Indeks Distribusi pendapatan
2	Indek Pembangunan Gender (IPG)	90,33	88,91	89,88	89,09	Sumber data : BPS Kalteng dalam angka 2019 <u>Formula :</u> IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Gender adalah Perbedaan Peran, Kedudukan dan Tanggung Jawab dan pembagian kerja antara Laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal.

Kualitas Sumber Daya manusia menjadi salah satu factor penentu daya saing Negara. Berdasarkan komposisi jumlah penduduk, SDM laki-laki dan perempuan hamper setara. Artinya Perempuan menentukan separuh dari pencapaian pembangunan manusia. Untuk meningkatkan daya saing Negara melalui pembangunan manusia, sebuah Negara perlu meningkatkan kesetaraan gender yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Dalam mengukur pembangunan manusia dengan memasukan aspek gender, terdapat dua indikator yang digunakan, yakni :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan

Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Dimensi Pengukuran IPG

Dimensi	Indikator	IPG/GDI
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Tabel 3.9
Perbedaan IPG Metode Lama dan Baru

	Lama	Baru
Penghitungan	IPG = IPM tertimbang jenis kelamin	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • IPG harus dianalisis bersama IPM • Selisih IPG dg IPM merupakan gap capaian gender • Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil 	<ul style="list-style-type: none"> c. IPG dapat diinterpretasikan sendiri d. Semakin mendekati angka 100, maka semakin

	<p>ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki 	<p>kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki</p> <p>e. IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki</p> <p>f. IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki</p> <p>g. IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki</p>
--	--	--

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal : pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintah, dan kehidupan ekonomi khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga .

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran

aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Tabel 3.10
Dimensi Pengukuran IDG

Dimensi	Indikator	IDG/GEM
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	
Pengambilan keputusan	Proporsi dari Pejabat Tinggi, manajer, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-laki & Perempuan	

Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) berdasarkan capaian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 -2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian IDG dan IPG 2014 - 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Tengah	89.33	89.25	89.07	88.91	89,13	89,09	77.87	78.23	79.36	77,03	83,20
Kotawaringin	90.04	90.04	-	91.7	91,7	91,6	63.9	-	63.3	59.72	64,11

n Barat			6	6	9	8	1				
Kotawaringi	86.07	86.79	-	87.7	87,7	87,9	70.2	-	67.8	67,35	67,36
n Timur			3	4	1	3	-	7			
Kapuas	95.36	95.65	-	96.5	96,2	95,5	68.2	-	71.5	75,34	73,81
			9	6	1	1	-	0			
Barito	93.46	93.34	-	93.0	92,3	92,0	83.8	-	81.6	83,19	86,33
selatan			2	5	4	8	-	7			
Barito utara	85.50	85.62	-	85.1	85,8	87,1	84.3	-	86.2	84,52	85,35
			6	9	5	5	-	0			
Sukamara	90.14	90.09	-	91.2	91,4	90,8	61.2	-	59.7	65,77	66,36
			4	5	4	4	-	8			
Lamandau	91.06	91.55	-	91.9	91,8	91,9	53.5	-	54.1	54,98	71,06
			7	8	0	5	-	3			
Seruyan	88.87	88.42	-	88.6	89,4	89,4	69.7	-	70.1	70,07	62,83
			4	6	4	0	-	3			
Katingan	83.88	84.78	-	85.5	85,7	85,5	60.7	-	66.8	73,32	66,57
			1	0	7	9	-	7			
Pulang	90.27	90.25	-	91.7	91,7	92,1	69.3	69.3	-	74,1	70,36
Pisau			0	2	0	8	2	-	3		
Gunung	91.80	92.00	-	91.7	91,8	92,1	81.0	79.9	-	82,7	88,91
Mas			4	9	0	1	8	-	3		
Barito	87.75	88.16	-	88.3	88,4	88,7	66.0	75.8	-	76,5	82,67
Timur			6	1	6	1	0	-	0		
Murung	81.53	82.31	-	82.9	83,2	83,4	65.1	65.8	-	67,3	68,10
Raya			2	3	1	6	2	-	8		
Kota				94.4	94,6	94,9					78,95
Palangka	93.80	94.30	-		6	6	79.5	79.8	-	80,6	
Raya			2				9	3	-	1	

Sumber Data : Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Tengah pada tahun 2019 berada pada peringkat 24 dari 34 Provinsi , naik satu peringkat dari tahun

sebelumnya . dan hanya 5 Kabupaten /kota yang memiliki IPG dibawah I Dalam PG Provinsi yaitu Barito Timur, Kotawaringin Timur, Barito Utara , Katingan dan Murung Raya. Sedangkan untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pada tahun 2020 IDG Kalimantan Tengah berada pada peringkat 1 dari 34 Provinsi , naik dari dua peringkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kabupaten /kota yang memiliki IDG diatas IDG Provinsi yaitu Gunung Mas , Barito Selatan dan Barito Utara . Ini merupakan keberhasilan Kalimantan Tengah dalam komitmen yang luar biasa dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Tengah.

3.3 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO

Dalam pencapaian sasaran berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Sasaran 3

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	persen	0,0244	0,0105	233,41	0,0182	8,5097	0.085

Sumber Data : Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator penurunan Rasio KDRT merupakan rincian dari Jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1000

a. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2020 tercatat sebanyak 108 kasus

berdasarkan angka yang tercatat pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah pada simponi KPPA, jika dibandingkan dengan tahun 2019 tercatat ada 149 kasus.

- b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2020 berjumlah 718.824 dan pada tahun 2019 berjumlah 704.473.
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020 = $(108/718.824) \times 1000 = 0,1502$, jika dibandingkan dengan dengan tahun 2019 = $(149/704.473) \times 1000 = 0,2115$.
- d. Capaian pada tahun 2020 sebesar 0,1502 artinya menurun menjadi 0,0613 dari target 0,0213, dari capaian tahun sebelumnya.
- e. Capaian pada tahun 2020 adalah 0,1502 artinya bahwa pada tahun 2020 setiap 1000 rumah tangga terdapat 0,1502 kasus KDRT atau dengan pendekatan per 10.000 rumah tangga terdapat 0,9 kasus KDRT.

Di satu sisi apabila memperhatikan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2020, terdapat peningkatan sebanyak 108 kasus dari tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap tindakan promotif preventif pemerintah dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah laporan terhadap kasus KDRT ke lembaga atau unit layanan. Namun disisi lain masih tingginya jumlah kasus memerlukan perhatian yang serius dalam usaha penanganannya, dengan mempertimbangkan jumlah dan kompetensi SDM serta sarana prasarana yang memadai untuk mewujudkan layanan yang optimal bagi masyarakat terutama perempuan dan anak. Dengan tercapai target sasaran pada tahun 2020 dilihat efektifnya UPT Perlindungan perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah berdiri dimana masa pandemi covid-19 anggaran sangat minim tapi bisa mencapai target pelayanan 100% yang ada, dengan dana yang tersedia sebesar 170.000.000 anggaran yang terpakai 130.611.576 ada dana yang dikembalikan ke negara sebesar 39.388.424 dapat mencapai target sasaran pada tahun 2020.

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian dari indikator kinerja sasaran ini antara lain :

- a. Budaya yang berkembang di masyarakat yang membesarkan anak laki-laki

- dengan menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus kuat dan berani, menyebabkan pemikiran pada laki-laki sejak kecil bahwa dirinya haruslah yang menang dalam melakukan segala tindakan, hal ini membentuk *mindset* bahwa laki-laki adalah pihak yang superior dan perempuan adalah pihak inferior
- b. Laki-laki dan perempuan yang tidak diposisikan setara dalam masyarakat atau budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang paling nampak dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya diskriminasi gender terutama tindak kekerasan terhadap perempuan
 - c. Kondisi ekonomi yang masih labil mengakibatkan timbulnya berbagai perselisihan dalam rumah tangga sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak tidak terpenuhi
 - d. Persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 5. Pergub No 60 Tahun 2019 Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak memudahkan dalam memberikan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah.
 6. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan yang relevan.

Program tersebut antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 4) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
- b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki
- c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu

- kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
- e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota
 - f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dalam lingkup apartur penanganan kasus di Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - g. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
 - h. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
 - i. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan
 - j. Peningkatan Ekonomi Pemberdayaan perempuan yang berdampak pada kekerasan .

3.4 Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Termasuk TPPO

Tabel 3.13

Indikator Kinerja Sasaran 4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	persen	100	100	100	100	100	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n termasuk TPPO								

**Sumber Data : Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah**

Dilihat dari capaian rasio kekerasan terhadap perempuan mencapai target baik pada tahun 2019 maupun 2020 dimana dapat terlayannya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Tengah capaian pada tahun 2019 sebesar 100 % dan pada tahun 2020 sebesar 100 %. Dimana beberapa kegiatan yang mendukung pada anggaran APBD pada tahun 2020 walaupun masa pandemi covid 19 tapi masih ada kegiatan yang lebih efektif yaitu Promosi dan edukasi dan juga dengan adanya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah dana 176.237.500 realisasi 136.849.076 ada dana menghemat sebesar 39.388.424 dengan capaian 100 % mencapai target untuk indikator sasaran

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

Indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tuntas pada unit layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di kali 100, pada tahun 2019 tercatat 13 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah sd Desember 2020 = 48 kasus dan pada tahun 2019 = 46 kasus
- b. Jumlah kasus yang sudah terlayani berdasarkan standar layanan pada UPT

- Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2020 = 48 kasus dan pada tahun 2019 = 46 kasus
- Realisasi indikator Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar = $(48/48) \times 100 = 100\%$
 - Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = $(100/100) \times 100 = 100\%$
 - Capaian kinerja sasaran = **100%**

Tabel 3.14
Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 – 2020

Jenis Kasus	Jumlah Kasus				
	2016	2017	2018	2019	2020
KDRT	9	12	5	0	3
Pelecehan Seksual	0	0	0	22	7
Bunuh Diri	0	0	0	0	0
Eksplorasi Seksual	0	0	0	0	0
Aborsi	0	0	0	0	0
Pencurian	0	0	0	0	0
Perzinahan	3	0	3	0	0
Perdagangan Perempuan	0	1	0	0	0
Perkosaan	4	0	0	0	3
Penelantaran Dalam Rumah Tangga	5	3	1	6	5
Penganiayaan	0	2	2	0	0
Kekerasan psikis	0	2	1	13	0
Trauma	0	3	0	0	1
Kekerasan Fisik	0	0	0	5	0
Persetubuhan anak di bawah umur	0	0	0	0	11
Tppo	0	0	0	0	1
Kenakalan remaja	0	0	0	0	3
Bawa lari anak	0	0	0	0	1

Hak asuh anak	0	0	0	0	9
penyimpangan	0	0	0	0	1
Perselisihan rumah tangga	0	0	0	0	2
Broken home	0	0	0	0	1
JUMLAH	21	23	13	46	48

Sumber Data : UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak optimalnya capaian pada sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, yaitu :

- a. Regulasi pada unit layanan lain yang terkait seperti Dinas Sosial dan Kepolisian yang memiliki prosedur dan tata layanan masing-masing.
- b. Perubahan struktur jabatan di unit layanan terkait.
- c. Kurang maksimalnya unit layanan pada Kabupaten/Kota
- d. Terbatasnya fasilitas guna penjangkauan kasus
- e. Masih kurangnya Kapasitas dan Kuantitas SDM pada unit layanan terbatas, dimana pada unit layanan sangat dibutuhkan tenaga profesional yang ditunjukkan dengan sertifikat keahlian, dan pada unit layanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah tenaga profesional masih sangat jarang terutama yang memiliki sertifikat keahlian dalam hal mediasi dan konseling.
- b. Masih Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi data dasar guna formulasi kebijakan .
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan perempuan

- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan perempuan, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
4. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- a. Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari

dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tantangan / Hambatan

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan menjadi suatu langkah besar dalam usaha pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut andil mengatasi kekerasan yang terjadi. Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan.
- b. Pola penanganan dalam hal penegakan hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya patriarki
- c. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan sosial
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender
- e. *Capacity Building* tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak kepada Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota
- f. Peningkatan kapasitas SDM melalui *Capacity Building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bagi internal Badan PP dan PA di Provinsi

dan Kabupaten/Kota

- g. Meningkatkan jumlah tenaga profesional yang bersertifikat dengan mengikutsertakan tenaga pendamping pada pelatihan dan uji kompetensi
- h. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak.
- i. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- j. Memperkuat mekanisme pencatatan dan pelaporan

3.5 Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dalam pencapaian indikator sasaran lima untuk berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada indikator capaian 2 (dua) tahun ini :

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Sasaran 5

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	Persen	35,71	42,85	83,33	35,71	42,71	83,33
	Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0213	1,3724	1,55	0,182	1,0082	18,05

Sumber Data; Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menjalankan perannya guna memastikan adanya peningkatan akses anak dan keluarganya terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan peningkatan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Demi terwujudnya kondisi yang ideal yang menjadi tujuan bersama, dimana hak anak dapat terpenuhi, pandangan anak mendapatkan penghargaan, serta anak terlindungi. Perlu dikembangkan kebijakan yang dapat mewujudkan bebasnya anak dari berbagai diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan yang salah serta mampu memenuhi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dibidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dan lingkungan bagi tumbuh kembang anak yang optimal, untuk itu dikembangkan kebijakan dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota layak anak. Selain itu kebijakan lain yang terus diupayakan untuk diwujudkan adalah terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak dengan mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Partisipasi anak dalam kebijakan tersebut diartikan sebagai upaya melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak, secara langsung maupun tidak langsung, dilaksanakan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati perubahan yang terjadi akibat dari keputusan tersebut. Terkait hal tersebut maka pada tahun 2020 ditetapkan sasaran strategis Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak, yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

Indikator : Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama

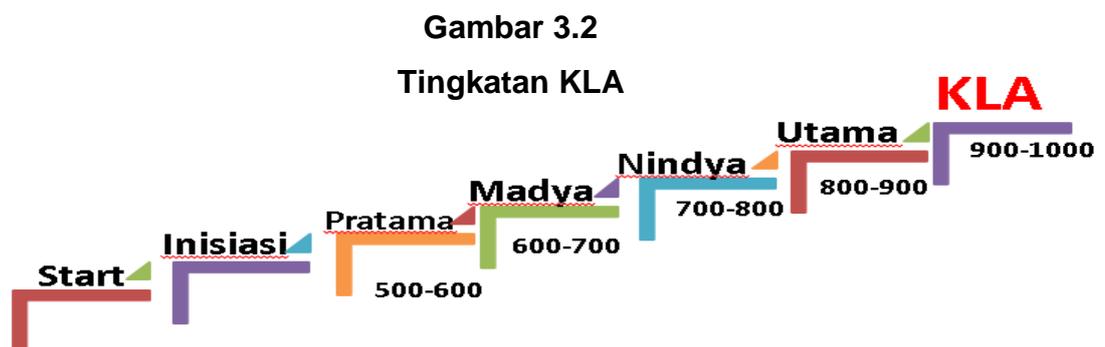
Kabupaten/Kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang diukur melalui 5 (lima) klaster sebagai berikut :

Klaster I : Hak sipil dan Kebebasan

Klaster II : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

- Klaster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
Klaster IV : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
Klaster V : Perlindungan khusus

Guna menentukan Kabupaten/Kota Layak Anak di laksanakan evaluasi secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk menentukan pada tingkatan mana capaian Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kaupaten/Kota Layak Anak yang ditunjukkan dengan skor dengan kriteria sebagai berikut :



Dimana skor pada masing-masing tingkatan ditentukan berdasarkan kriteria capaian pada tahun 2019 terhadap :

- Kelembagaan	100	point
- Klaster I	125	point
- Klaster II	180	point
- Klaster III	150	point
- Klaster IV	130	point
- Klaster V	215	point
- Kecamatan	25	point
- Desa/Kelurahan	75	point
Total	1000	point

Sehubungan pandemi covid 19 di Indonesia pada tahun 2020 untuk penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak tidak dilaksanakan di Indonesia .Sesuai surat dari Kementerian Pemberdayaan RI No. 566/KPPA/D.IV/Sesdep/062020 tanggal 22 Juni 2020 dimana dijelaskan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian untuk Kabupaten/Kota Layak Anak . Sehingga Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada

Kabupaten/Kota layak Anak sehingga target dapat tercapai. Adapun anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar 49.910.100 dana yang terpakai 49.910.100.



Surat Kementerian PPPA Tidak dilakukan Penilaian KLA

Indikator : Rasio anak korban kekerasan

- Jumlah Penduduk usia anak di Kalimantan Tengah tahun 2020 = 963.347 orang, Jumlah Penduduk usia anak di Kalimantan Tengah tahun 2019 = 956.637 orang.
- Jumlah kasus anak korban kekerasan tahun 2020 = 81 kasus, pada tahun 2019 = 31 kasus.
- Target pada tahun 2020 = **0,0182**, target pada tahun 2019 = 0,0213.
- Realisasi indikator Rasio anak korban kekerasan pada tahun 2020 = $(81 / 963.347) * 1.000 = \mathbf{0,0841}$.
- Realisasi indikator Rasio anak korban kekerasan pada tahun 2019 = $(31 / 956.637) * 1.000 = \mathbf{0,0324}$.
- artinya pada 1.000 orang penduduk usia anak di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 terdapat **0,0841** orang anak menjadi korban kekerasan, atau dengan menggunakan cakupan lebih luas 100.000 orang penduduk usia anak maka pada 100.000 orang penduduk usia anak di Kalimantan Tengah terdapat **8,4** orang anak menjadi korban kekerasan.
- Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = $(\mathbf{0,182} / \mathbf{0,0841}) * 100 = \mathbf{216,41\%}$.
 - Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan

kinerja DP3APPKB nantinya perlu diperhatikan beberapa hal sbb:

- Karena sasarannya – (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya, untuk menghitung capaian indikator rumusnya = **(target / capaian) * 100**
- Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
- apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah kasus)
- tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila kasus meningkat, juga sebaliknya.

- h. Capaian kinerja sasaran = persentase rata-rata capaian Indikator 1 dan 2 = **9,025 %**

Tabel 3.16

Data Kekerasan Terhadap Anak 2018 - 2020 pada data SIMPONI KPPPA

Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
	2018	2019	2020
Fisik	36	33	26
Psikis	37	45	30
Seksual	86	74	54
Eksplorasi	2	0	6
Trafficking	0	0	2
Penelantaran	18	5	10
Lainnya	17	16	28
JUMLAH	196	173	156

Sumber Data; Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dari target rasio anak korban kekerasan di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 mencapai target 100% dimana kasus yang dilaporkan di UPT Perlindungan Perempuan dapat dilayani dengan baik dan dapat diselesaikan. Dana yang

mendukung kegiatan tersebut berjumlah 170.000.000 dana yang terpakai 130.611.576 ada kelebihan dana yang dikembalikan ke negara berjumlah 39.388.424 dengan capai target indikator berhasil dicapai 100 % .

3.6 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak

Dalam pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.17
Indikator Kinerja Sasaran 6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	Persen	100	70,52	100	100	51,92	100

Sumber Data; Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3APKB Provinsi Kalteng

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak di Kalimantan Tengah mencapai target 100 % sama seperti tahun 2019, dimana dengan berdirinya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan di lihat target sasaran khusus pada anak korban kekerasan

alapun di masa pandemi covid-19 ini pelayanan terus berjalan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang minim pada tahun 2020 berjumlah 170.000.000 dan terpakai sebesar 130.611.576 ada kelebihan dana yang dikembalikan ke negara berjumlah 39.388.424 dengan capai target indikator berhasil dicapai 100 % .

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

Indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar merupakan rincian dari jumlah penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang tuntas pada unit layanan UPT-PPA dibagi dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di kali 100, pada tahun 2020 tercatat 156 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak pada UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 = 156 kasus dan pada tahun 2019 = 173 kasus.
- b. Jumlah kasus yang sudah terlayani berdasarkan standar layanan pada UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2020 = 81 kasus dan pada tahun 2019 = 122 kasus.
- c. Realisasi indikator Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar pada tahun 2020 = $(81 / 156) * 100 = 51,92 \%$ dan pada tahun 2019 = $(122 / 173) * 100 = 70,52 \%$.
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = $(100 / 51,92) * 100 = 192,60\%$
- e. Capaian kinerja sasaran = **100%**.

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian pada sasaran “Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak” dan “Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak” yaitu :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dalam beragam bentuk, seperti advokasi kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menggugah komitmen terhadap perlindungan hak anak.

- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar perumusan kebijakan.
- c. Masih lemahnya sistem koordinasi kebijakan perlindungan anak antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Masih kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
- e. Munculnya suatu pola pemahaman dalam pelaksanaan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan perlindungan anak yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen aksi perlindungan anak.
- f. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait perlindungan anak, yang dapat dituangkan kedalam suatu model inventarisasi masalah yang dapat disusun dalam bentuk konsep/naskah kajian permasalahan yang terjadi dan informasi-informasi lain yang mendukung guna memunculkan persepsi kebutuhan akan pentingnya aksi atas permasalahan yang terjadi, baik itu berupa suatu peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang dinilai perlu dilaksanakan dalam menjawab isu yang ada.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak, antara lain adalah :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
 4. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

- b. Sudah terbentuknya Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam hal respon terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 3) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Tantangan / Hambatan

Namun demikian masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Pembangunan yang peduli anak, termasuk perlindungan haknya, masih belum menjadi *mainstream* pemahaman para pemangku kepentingan;
- b. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan;
- d. Masih kurangnya koordinasi kebijakan anak antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Belum optimalnya evaluasi kebijakan anak sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk penguatan kelembagaan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait anak.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan anak melalui pelatihan-pelatihan dan diklat teknis penyusunan data anak.
- d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.
- e. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak kepada para pemangku kebijakan, anggota DPRD, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

3.7 Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Kepada Anak

Dalam pencapaian sasaran dalam meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Sasaran 7

Sasaran	Indikator	Satua	2019	2020
---------	-----------	-------	------	------

	Kinerja	n	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Persen	11,1 1	18,6 0	209,2 8	13,3 3	11,1 1	83,3 4

Sumber Data; Bidang Data dan Informasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dari data data diatas terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 209,29% dan pada tahun 2020 sebesar 83,34 % dimana pada tahun 2020 ini pandemi covid 19 di Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah perangkat daerah yang telah memiliki data gender dan anak yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Gender dan Anak tahun 2020, ada 8 Perangkat daerah dari 43 Perangkat Daerah pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai yang memiliki data terpilah dan telah dituangkan kedalam SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) yang dapat diakses pada SIGA Kalteng dengan alamat Url <http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga/>. Melihat kondisi pandemi covid-19 ini dengan dana yang minim hampir di semua perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Tengah capaian 83,84 % merupakan keberhasilan di kondisi pandemi covid-19. Dengan dana yang minim di Dinas P3APPKB sebesar 37.200.000 dapat mencapai target sasaran 83,34 %.

Adapun Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak merupakan rincian dari jumlah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sistem data gender dan anak atau dengan kata lain telah memiliki data terpilah dan telah dituangkan kedalam SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) yang dapat diakses pada SIGA Kalteng dengan alamat Url <http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga/> pada tahun 2020 tercatat 8 Perangkat Daerah telah memiliki Data Gender dan anak dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jumlah perangkat daerah yang telah memiliki data gender dan anak yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Gender dan Anak tahun 2020, ada 8 Perangkat daerah dari 43 Perangkat Daerah pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
 4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Badan Narkotika Nasional
 8. Dinas Kesehatan
- Pada tahun 2020 sebanyak 8 Perangkat Daerah telah memiliki data gender dan anak
- b. Realisasi indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak pada tahun 2019 = $(8/43)*100 = 18,60\%$
- c. Realisasi indikator Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak pada tahun 2020 = $(8/43)*100 = 18,60\%$
- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 = $(18,60/11,11)*100 = 209,281\%$
- e. Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = $(18,60/13,33)*100 = 83,34 \%$
- f. Capaian kinerja sasaran = **83,34 %**

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, antara lain adalah :
1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di

daerah

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dukungan dan kerjasama dari lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta implementasi data gender sebagai data sektoral pada lingkup kewenangannya asing-masing.
- c. Terbangunnya jejaring antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam merepon pelaksanaan kebijakan PPRG pada lingkup organisasinya masing-masing melalui tersedianya data terpilah gender.
- d. Terbangunnya Sistem Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses pada alamat url : www.dp3appkb.kalteng.go.id dimana didalamnya termuat aplikasi teknis Sistem Informasi Gender dan Anak yang memuat informasi data terpilah gender dan anak sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan program dan kegiatan antara lain :

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 4) Program penyusunan profil lembaga

Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pencapaian target dari indikator kinerja sasaran antara lain :

- a. Belum adanya regulasi yang mendukung terintegrasinya perspektif gender didalam proses penyusunan Program dan Kegiatan di Kabupaten/Kota serta kebijakan data gender

- b. Masih rendahnya komitmen para penentu kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota
- c. Terbatasnya referensi untuk menggali dan mengidentifikasi isu gender yang ada yang berpengaruh pada ketersediaan data terpilah gender
- d. Keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin dimasing-masing sektor pembangunan
- e. Perubahan struktur organisasi yang berakibat adanya perubahan personel kelembagaan daerah yang silih berganti dalam waktu singkat dan tentunya belum memahami permasalahanan gender
- f. Sistem Informasi masih berkembang dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tantangan / Hambatan

Namun demikian dari keberhasilan capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai *gender machinery* di daerah belum optimal.
- b. Keterbatasan Akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan
- c. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi daerah, sehingga menyebabkan efektifitas sosialisasi, pelatihan, advokasi tidak optimal;
- e. Adanya pemahaman tentang PUG dan peran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih bervariasi;
- f. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah.

- h. Terjadinya perkembangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan hukum serta pada pembangunan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam program dan strateginya.

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui adanya advokasi khususnya kepada Kepala SKPD (unit eselon II), DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lingkup Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan (responsif gender) dan percepatan pelaksanaan PUG serta inovasi dalam pelaksanaan PUG yang tentunya disertai ketersediaan data terpilah gender sebagai data awal /data pembuka wawasan dalam analisis gender.
- b. Pendampingan secara intensif dalam rangka penguatan kelembagaan PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak pada di lingkup organisasi dan daerah mitra kerja
- c. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan dalam rangka implementasi PUG melalui Sistem Informasi Gender dan anak
- d. Memperkuat mekanisme pelaporan dan evaluasi tentang pelaksanaan Sistem Informasi Gender dan anak
- e. Penguatan Kelembagaan Data Gender
- f. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan memanfaatkan data gender.

3. 8 Meningkatkan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran

Dilihat dari capaian meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran untuk dua tahun dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Sasaran 8

Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Persen	B+	B	90,6	B+	B+	100

Sumber Data : subag Penyusunan Program Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana. Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi organisasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Sehingga disusunlah Sasaran Strategis “Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”. Untuk sasaran dan indikator mencapai target 100% untuk tahun 2020 ada peningkatan dari tahun sebelumnya dimana ada perbaikan dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi dimana capaian yang dicapai pada sebesar **71,12** dengan kategori **BB (Sangat Baik) Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**. Sedangkan capaian nilai hasil evaluasi Tahun 2018 yaitu sebesar **63,48** dengan kategori **B (Baik)**, berarti nilai capaian kinerja tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,64. Dapat disimpulkan bahwa instansi yang bersangkutan telah melakukan langkah-langkah perbaikan sejalan hasil rekomendasi evaluasi laporan kinerja pada periode sebelumnya, seperti antara lain

pembuatan SOP, penilaian kinerja dan monitoring pencapaian target kinerja secara berjenjang (mulai dari eselon IV) sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Namun masih ada perbaikan yang harus dilakukan, antara lain terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, capaian target yang belum terpenuhi, dan hubungan antara Renstra PD terhadap pencapaian fokus kinerja RPJMD. Dan anggaran yang tersedia untuk mendukung capaian tersebut sebesar 2.879.208.789 dengan realisasi 2.742.539.644 (95,25%) ada menghemat dana sebesar 136.669.145, dengan capaian sasaran 100%.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Hasil Penilaian SAKIP

- a. Hasil Penilaian laporan Kinerja tahun 2020 DP3APPKB mendapatkan angka = 71,12 = **B+** , merupakan **Nilai Capaian SAKIP 2019 yang dikeluarkan pada tahun 2020**
- b. Hasil Penilaian laporan Kinerja tahun 2019 DP3APPKB mendapatkan angka = **63,48 = B**
- c. Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = 71,12 %. **Nilai ini didapatkan dengan rumus : Nilai Capaian SAKIP / Nilai Capaian Minimal SAKIP sesuai Target.**

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Sumber : Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

LKIP

- d. Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = 100 %
- e. Capaian kinerja sasaran = 100 %

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya jumlah personil
 - b. Perlunya peningkatan SDM dalam penilaian kinerja
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di organisasi.
 - e. Kurangnya tindak lanjut dalam menganalisa suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi
 - f. Kurangnya komitmen internal organisasi dalam pencapaian indikator sasaran
- d. Adanya keterbukaan informasi yang tersampaikan melalui **Website DP3APPKB**
: www.dp3appkb.kalteng.go.id

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dalam pelaksanaan organisasi, antara lain adalah :
 - 1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
 - 4. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Komitmen dalam pelaksanaan kinerja sudah terbentuk

- c. Motivasi yang tinggi dalam membangun organisasi
- d. Perubahan fungsi dari koordinasi menjadi pelayanan khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah.

Di samping itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga tidak dapat terlepas dari dukungan program antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah
- 5) Program-program teknis dalam pencapaian indicator kegiatan
- 6) Adanya penghargaan kepada pejabat eselon III yang telah mencapai target dalam bentuk surat dari Kepala Dinas.

Tantangan / Hambatan

Beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian secara umum , antara lain :

- a. Berkembangnya sistem kebijakan pemerintahan menuntut profesionalisme para aparatur dalam berkinerja
- b. Pengelolaan kinerja organisasi yang menuntut perlunya pengawasan, kontrol, serta tindak lanjut yang berkesinambungan
- c. Antusias aparatur terhadap perubahan serta dinamika yang terjadi dalam organisasi, terkadang mempengaruhi kinerja

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan konsistensi dalam melaksanakan pengembangan kapasitas serta pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi yang dimulai dari unit terkecil dalam organisasi, yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kapasitas dan kinerja aparatur
- b. Dilakukan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja aparatur, serta pemberlakuan *punishment* dan *reward* terhadap

aparatur.

- c. Meningkatkan tatakelola organisasi yang baik
- d. Peningkatan Sumber Daya manusia dalam penguatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya.

3.9 Menurunnya Angka Kelahiran

Dilihat dari capaian sasaran menurunnya angka kelahiran untuk dua tahun dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.20
Indikator Kinerja Sasaran 9

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,29	99.56	2,19	2,24	97,76
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1,2	1,2	100	1	1	100

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Dilihat data di atas didapatkan untuk sasaran menurunnya angka kelahiran untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang ditetapkan baik untuk indikator kinerja Angka kelahiran total per WUS dan Rata-rata jumlah anak per Keluarga. Dan ini merupakan keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pandemi covid 19 dapat menekan angka kelahiran. Dengan anggaran yang minim sebesar 63.449.500 dan terpakai sebesar 63.449.500. Dan capaian sasaran Angka kelahiran total per WUS 97,76 % dan Rata-rata jumlah anak per Keluarga sebesar 100% semua berkat kesadaran dari masyarakat Kalimantan

Tengah dan dukungan dan Kabupaten/Kota.

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya angka kelahiran terdiri dari 2(dua) indikator yaitu :

Indikator : Angka kelahiran total per WUS

Indikator Angka kelahiran total per WUS merupakan rincian dari Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksi, Dengan TFR sebagai acuan, suatu daerah dapat merencanakan program untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 Total Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) = **2,24**
- b. Pada tahun 2019 Total Fertility Rate Kalimantan Tengah berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2019 = **2,29**
- c. Pada tahun 2020 terjadi penurunan TFR sekitar 0,05, yang menunjukkan bahwa harapan untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai.

Indikator : Rata-rata jumlah anak per Keluarga

Indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan rincian dari Jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun di bagi dengan jumlah rumah tangga/keluarga, dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk anak pada tahun 2020 berjumlah 970.080, pada tahun 2019 berjumlah 894.800
- b. Jumlah rumah tangga pada tahun 2020 berjumlah 704.473, pada tahun 2019 berjumlah 690.000
- c. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2020 = **$970.080/704.473=1,37$**
- d. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2019 = $894.800/690.000$
- e. Capaian pada tahun 2020 adalah 1,37 yang menunjukkan secara umum kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa dalam setiap rumah tangga rata-rata memiliki 1-3 orang anak, hal ini menunjukkan program keluarga berencana dalam

mengendalikan laju angka kelahiran cukup berhasil di Kalimantan Tengah.

f. persentase capaian pada tahun 2020 = $(1/1,37) \times 100 = 99,2\%$

g. Tingkat capaian sasaran pada tahun 2020 = **99,2**

Tabel 3.21

Realisasi Indikator Kinerja Pada RPJMD

No.	Indikator	Target dan Capaian Kinerja				Keterangan
		2019		2020		
		T	R	T	R	
1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	159.285	239.863	153.678	509.444	Sumber data : Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota dan Perwakilan BKKBN Kalteng

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Pada tahun 2020 jumlah Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 239.304, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi pada tahun 2019 yang berjumlah 239.304. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya maupun yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (tahun 2018-2020)

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera 1		
	2018	2019	2020
Kalimantan Tengah	244.060	239.862	239.304
Kotawaringin Barat	22.678	19.523	19.406
Kotawaringin Timur	38.413	38.719	38.528

Kapuas	41.519	41.522	41.563
Barito selatan	18.247	18.127	18.127
Barito utara	15.479	15.486	15.472
Sukamara	4.444	4.441	16.776
Lamandau	8.205	7.459	8.448
Seruyan	8.448	8.448	4.370
Katingan	16.366	16.341	7.103
Pulang Pisau	15.284	15.233	9.588
Gunung Mas	9.588	9.588	15.232
Barito Timur	13.402	13.044	7.617
Murung Raya	7.607	7.617	12.838
Kota Palangka Raya	24.380	24.314	24.236

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya:

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut

Anggota keluarga melaksanakan ibadah

- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau

lebih.

- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. **Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)**

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin
- Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
- Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

4. **Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)**

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
- Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

3.10 Meningkatnya Akseptor KB

Dilihat dari capaian sasaran Meningkat Akseptor untuk dua tahun dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.23
Indikator Kinerja Sasaran 9

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,815	0,771	94,60	0,829	0,7985	90,58

Sumber Data : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Dilihat data diatas didapatkan untuk sasaran meningkatnya akseptor KB untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang ditetapkan baik untuk indikator kinerja rasio pemakaian kontrasepsi. Dan ini merupakan keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pandemi covid 19 dapat meningkatkan pemakaian kotrasepsi . Dengan anggaran yang minim sebesar 63.449.500 dan terpakai sebesar 63.449.500. Dan capaian sasaran meningkatnya akseptor KB 90,58 %, ini semua berkat kesadaran dari masyarakat Kalimantan Tengah dan dukungan serta komitmen dari Kabupaten/Kota.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya akseptor KB terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Rasio pemakaian kontrasepsi

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per

1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

- a. Jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan desember 2020 = 385.858
Jumlah peserta KB aktif sampai dengan bulan desember 2019 = 354.667
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan desember 2020 = 487.739
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan desember 2019 = 457.961
- c. Realisasi indikator Rasio pemakaian kontrasepsi pada tahun 2020
= $(385.858 / 487.739) * 100 = 0,791\%$
- d. Target pada tahun 2020 sebesar **0,823**
- e. Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = $(0,791 / 0,823) * 100 = 96,11\%$
- f. Capaian kinerja sasaran = **96,11 %**

Ini menunjukkan bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam berKB menurun **0,02** jika dibandingkan dengan tahun 2019 rasio akseptor KB **0,771**. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur pada tahun 2020, meningkatnya akseptor KB menunjukkan kesadaran masyarakat terutama Pasangan usia subur (PUS) dalam menyadari pentingnya KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga mendapatkan tanggapan yang positif.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB aktif per kabupaten/kota adalah dapat dilihat pada tabel 3.15 Data PUS dan Peserta KB Aktif 2018 – 2020.

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018-2020 :

Tabel 3.24

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020

NO	KABUPATE N/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESE RTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KON DOM	IMPL AN	SUNTI KAN	PIL	
		JUM LAH	JUM LAH	JUM LAH	JUML AH	JUM LAH	JUML AH	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	586	620	47	498	2.140	15.140	6.576	25.607

2	Kotawaringin Timur	1.487	1.345	195	1.894	12.279	34.380	22.594	74.174
3	Kapuas	791	529	51	899	5.797	22.836	15.558	46.461
4	Barito Selatan	204	260	8	171	2.492	9.307	9.063	21.505
5	Barito Utara	260	333	25	391	2.158	10.264	9.028	22.459
6	Katingan	193	122	11	409	4.577	14.269	8.439	28.020
7	Seruyan	294	123	44	433	2.293	8.597	4.092	15.876
8	Sukamara	383	46	4	273	1.223	7.748	2.183	11.860
9	Lamandau	342	114	89	118	1.540	7.466	2.684	12.353
10	Gunung Mas	81	438	9	275	2.807	15.126	2.034	20.770
11	Pulang Pisau	211	400	6	1.375	2.716	11.482	6.000	22.190
12	Murung Raya	485	420	10	404	2.856	9.138	6.340	19.653
13	Barito Timur	463	260	9	199	2.542	6.972	8.318	18.763
14	Kota P Raya	1.815	1.170	122	1.168	3.998	21.805	16.089	46.167
JUMLAH		7.595	6.180	630	8.507	49.418	194.530	118.998	385.858

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Tabel 3.25
Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2019

NO	KABUPATE N/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESE RTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KON DOM	IMPL AN	SUNTI KAN	PIL	
		JUM LAH	JUM LAH	JUM LAH	JUML AH	JUM LAH	JUML AH	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1.694	436	131	537	2.771	17.454	12.01 5	35.03 8
2	Kotawaringin Timur	1.410	1.339	196	1.873	10.89 8	31.941	21.65 0	69.30 7
3	Kapuas	670	526	86	962	5.308	17.166	15.02 1	39.73 9
4	Barito Selatan	178	237	6	171	2.186	5.616	7.382	15.77 6
5	Barito Utara	377	197	27	314	1.817	9.356	8.701	20.78 9
6	Katingan	188	132	14	509	3.849	12.528	9.431	26.65 1
7	Seruyan	242	122	36	603	1.612	8.978	4.389	15.98 2
8	Sukamara	143	27	2	236	466	6.038	1.850	8.762
9	Lamandau	288	102	84	94	1.392	7.239	2.535	11.73 4
10	Gunung Mas	143	120	9	200	2.333	13.436	2.291	18.53 2
11	Pulang Pisau	184	315	1	847	2.328	7.640	3.881	15.19 6
12	Murung Raya	339	317	10	369	1.861	8.666	6.610	18.17 2
13	Barito Timur	407	280	8	155	2.272	6.808	8.186	18.11 6

1	Kota	1.677	1.047	119	1.125	3.812	17.350	15.74	40.87
4	Palangkaraya							3	3
JUMLAH		7.940	5.197	729	729	42.905	170.216	119.685	354.667

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Tabel 3.26

Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIKAN	PIL	
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kotawaringin Barat	1113	775	129	1029	2753	17900	6735	30434
2	Kotawaringin Timur	1323	1308	209	1868	10524	32746	22261	70239
3	Kapuas	291	100	25	503	3068	9677	9276	22940
4	Barito Selatan	201	177	7	144	2751	5300	8242	16822
5	Barito Utara	254	151	25	282	1645	8537	8240	19134
6	Katingan	201	135	15	559	4042	13101	9562	27615

7	Seruyan	216	118	32	465	1932	7826	3929	14518
8	Sukamara	179	49	6	234	920	7253	2031	10672
9	Lamandau	289	100	97	112	1419	7647	3043	12707
10	Gunung Mas	91	182	6	242	2361	10974	2912	16768
11	Pulang Pisau	281	309	3	905	2266	8774	4679	17217
12	Murung Raya	270	256	10	377	1844	9352	7062	19171
13	Barito Timur	377	266	8	171	2014	6943	8457	18236
14	Kota Palangkaraya	1542	1054	149	1046	3577	19610	15591	42569
JUMLAH		6628	4980	721	7937	41116	165640	112020	339042

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

3.11 Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Dilihat dari capaian sasaran Meningkatkan Akseptor untuk dua tahun dapat dilihat pada table ini :

Tabel 3.27

Indikator Kinerja Sasaran 11

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya	Persentase	Rasio	7,59	12,5	60,72	5,73	11,88	48,23

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			2020		
			T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmed need)	kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)							

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dilihat data diatas didapatkan untuk sasaran Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmed need) untuk Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai target yang ditetapkan karena masyarakat Kalteng mempunyai kesadaran dalam ber KB. Dan ini merupakan keberhasilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di pandemi covid 19 dapat meningkatkan kebutuhan berkontresepsi . Dengan anggaran yang minim sebesar 63.449.500 dan terpakai sebesar 63.449.500. Dan capaian sasaran menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi 48,23 %, ini semua berkat kesadaran dari masyarakat Kalimantan Tengah dan dukungan serta komitmen dari Kabupaten/Kota.

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) terdiri dari 1(satu) indikator yaitu :

Indikator : Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)

- a. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan pada tahun 2020 = **28.106**, pada tahun 2019 = **28316**

$$= ((27558+28916)/487739)*100$$
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin tambahan anak/tidak ingin punya anak pada tahun 2020 = **29.816**, pada tahun 2019 = **29.136**
- c. Jumlah Pasangan Usia Subur sampai dengan bulan Desember 2020 = **487.739**, pada tahun 2019 = **457.961**
- d. Realisasi indikator *unmet need KB* sampai dengan tahun 2020=

$$= ((28106+29816)/487739)*100= 11,88\%$$

- e. Realisasi indikator *unmet need KB* pada tahun 2019=
$$= ((28.316+29.136)/457961)*100 = 12,55\%$$
- f. Target pada tahun 2020 sebesar **5,73 %**, target pada tahun 2019 = **7,59%**
- g. Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 = $(5,73/ 11,88)*100 = 48,23\%$

Dalam hal mempermudah akumulasi/rata-rata capaian keseluruhan kinerja DP3APPKB perlu diperhatikan sebagai berikut :

- *Karena sasarannya – (negatif), untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya, untuk menghitung capaian(kolom9) rumusnya = (target / capaian)*100*
 - *Pendekatannya apabila capaian menunjukkan persentase diatas 100%, maka pelaksanaan kinerja efektif (bergantung kepada jumlah unmet need dan PUS)*
 - *apabila capaian menunjukkan persentase dibawah 100%, maka pelaksanaan kinerja kurang efektif (bergantung kepada jumlah unmet need dan PUS)*
 - *tidak menutup kemungkinan persentasenya menurun apabila Jumlah unmet need PUS meningkat, juga sebaliknya.*
- h. Capaian kinerja sasaran = **48,23 %**

Berikut ini data peserta KB aktif berdasarkan metode kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2020 :

Tabel 3.28
Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2020

N	KABUPATEN/KOT	JUMLA	PUS	PUS BUKAN PESERTA KB YANG
---	---------------	-------	-----	---------------------------

O	A	H PUS	BUKAN PESERT A KB	HAMIL	INGIN ANAK SEGER A	INGIN ANAK DITUND A	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	2						
1	Kotawaringin Barat	39.225	13.618	1.800	3.794	3.315	4.709
2	Kotawaringin Timur	97.635	23.461	2.775	9.307	6.064	5.315
3	Kapuas	57.164	10.703	987	2.413	3.202	4.101
4	Barito Selatan	29.025	7.520	558	2.075	2.186	2.701
5	Barito Utara	25.325	2.866	662	918	700	586
6	Katingan	33.906	5.886	966	1.858	1.504	1.558
7	Seruyan	21.417	5.541	864	1.465	1.518	1.694
8	Sukamara	14.407	2.547	343	820	660	724
9	Lamandau	16.133	3.780	540	1.330	942	968
10	Gunung Mas	27.283	6.513	565	1.457	1.968	2.523
11	Pulang Pisau	25.835	3.645	317	940	1.151	1.237
12	Murung Raya	23.873	4.220	398	1.514	1.611	697
13	Barito Timur	23.516	4.753	459	1.433	1.016	1.845
14	Kota Palangkaraya	52.995	6.828	445	2.956	2.269	1.158

JUMLAH	487.739		11.67			29.81
		101.881	9	32.280	28.106	6

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Tabel 3.29

Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB Tahun 2019

N O	KABUPATEN/KO TA	JUMLA H PUS	PUS BUKAN PESERT A KB	PUS BUKAN PESERTA KB YANG			
				HAMI L	INGIN ANAK SEGER A	INGIN ANAK DITUND A	TIDA K INGI N ANA K LAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotawaringin Barat	50.273	15.235	2.211	4.550	3.474	5.000
2	Kotawaringin Timur	92.158	22.851	3.073	8.917	5.746	5.115
3	Kapuas	51.942	12.203	987	2.798	4.357	4.061
4	Barito Selatan	20.206	4.430	476	1.226	1.228	1.500
5	Barito Utara	25.506	4.717	648	1.229	1.433	1.407
6	Katingan	32.564	5.193	1.417	1.748	1.426	1.322
7	Seruyan	22.115	6.133	1.873	1.384	1.314	1.562
8	Sukamara	11.074	2.312	297	735	620	660
9	Lamandau	15.682	3.948	667	1.376	926	979
10	Gunung Mas	24.345	5.813	667	1.407	1.378	2.361
11	Pulang Pisau	18.591	3.395	310	669	1.180	1.236
12	Murung Raya	21.673	3.501	302	1.241	1.323	635
13	Barito Timur	23.002	4.886	445	1.492	1.136	1.813
14	Kota Palangkaraya	48.830	7.957	493	3.204	2.775	1.485
JUMLAH		457.961	103.294	13.86 6	31.976	28.316	29.13 6

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Faktor Penentu Keberhasilan / Kegagalan

Meskipun rata-rata pencapaian sasaran sudah baik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya fasilitasi yang dilakukan Instansi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota terkait bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Kurangnya data yang mutakhir, akurat dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar pengajuan peformulaan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi.
- d. Masih kurangnya komitmen para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga muncul anggapan bahwa Sektor Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera hanya merupakan sektor pendukung dalam Pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Mudahnya akses dari internet dapat menyebabkan banyaknya informasi terkait program bangga kencana dan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat.
- g. Munculnya suatu pola pemahaman dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi yang menuntut keharusan adanya dukungan anggaran untuk mencapai kinerja tugas dan fungsi, sehingga tindak lanjut atas kebijakan Program Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang minim anggaran akan mengakibatkan terlambatnya koordinasi, tindak lanjut, penguatan komitmen.

Di samping faktor penghambat, terdapat pula beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran berikut target-target indikator, yaitu :

- Adanya dukungan regulasi ataupun kebijakan dan perundang-undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

- Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai PP Nomor 38 tahun 2007
- Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat di tempuh melalui berbagai event kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik seperti mobil unit penerangan, videotron, radio, televisi, maupun internet yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas
- Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan informasi tentang KB sudah cukup baik hanya saja Animo dan kesadaran masyarakat untuk ber KB masih minim.
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

Tantangan / Hambatan

Namun demikian sama dengan sasaran sebelumnya dari keberhasilan capaian tersebut di atas, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain :

- a. Keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan advokasi dan fasilitasi tentang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Ketersediaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- c. Masih kurang optimalnya koordinasi kebijakan, program dan kegiatan

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara pihak pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota

- d. Belum optimalnya evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai bahan penilaian, pengukuran, pengembangan dari kebijakan yang sudah ada
- e. Dalam rangka mencapai target TFR 2,19 pada akhir tahun 2020 dari kondisi saat ini yang masih 2,24 diperlukan upaya ekstra untuk mencapainya. Karena dalam menurunkan TFR, tidak dapat hanya semata-mata mengandalkan peningkatan kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB, tetapi juga bagaimana upaya dalam menekan kasus pernikahan dini dan pergaulan bebas yang berefek pada mengecilnya kasus persalinan remaja serta memotivasi pada PUS untuk mengurangi keinginan memiliki anak lebih dari 2.
- f. Dalam mencapai target CPR harus ada upaya ekstra untuk menambah jumlah akseptor baru melalui penyuluhan dan pelayanan yang prima selain menekan jumlah akseptor *dropout* sehingga efektif menaikkan Peserta KB aktif.
- g. Dalam menurunkan *unmet need* tidak cukup dengan pelayanan KB berkualitas dan dukungan sarana prasarannya yang memadai, tetapi juga harus dibarengi dengan kegiatan advokasi KIE yang intensif .

Solusi / Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut

Melihat beberapa tantangan sebagaimana dimaksud di atas, maka solusi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan intervensi secara terus menerus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penguatan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b. Meningkatkan ketersediaan data pendukung sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi melalui peningkatan intensitas koordinasi, pengawasan dan pemantauan langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun kajian-kajian ilmiah terkait permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk,

- Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui pelatihan-pelatihan dan diklat / bimbingan teknis
- d. Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) yang dilakukan secara intensif dan terarah dan tepat sasaran merupakan salah satu kegiatan kunci merubah pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap program Bangga Kencana (Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)
 - e. Perlunya kebersamaan, dukungan, komitmen, kepedulian, partisipasi, dan kerja sama dari berbagai mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dalam mencapai target program.
 - f. Pemantapan dan penguatan kelembagaan/forum daerah yang menangani bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - g. Memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah berjalan untuk tindak lanjut implementasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

B. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2020 adalah sebesar 10.788.314.369 (Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) ,dengan rincian :

Tabel 3.30
Kondisi BTL dan BL 2018 - 2019

JENIS BELANJA	2019			2020		
	JUMLAH	REALISASI	%	JUMLAH	REALISASI	%
BTL	7.611.123.080	5.994.903.731	78,77	7.909.105.580	6.781.556.560	85,74
BL	10.462.196.406	10.051.032.000	96,07	2.879.208.789	2.742.539.644	95,25

Jumlah	18.073.319.48	16.045.935.73	88,78	10.788.314.	9.524.096.2	88,2
	6	1		369	04	8

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

2. Realisasi anggaran Belanja Langsung perprogram kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Realisasi Belanja Langsung 2019 - 2020

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administr asi Perkantor an	2.523.442.9 06	2.456.226.4 86	97,3 4	1.707.213. 815	1.637.342. 134	95,9 1
1	Penyediaa n jasa surat menyurat	7.000.000	7.000.000	100	4.005.000	4.005.000	100
2	Penyediaa n jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	138.961.906	104.109.900	74,9 2	103.660.62 7	84.165.197	81,1 9
3	Penyediaa n jasa	134.946.000	109.131.059	80,8 7	103.406.80 0	89.136.368	86,2 0

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	948.374.000	945.176.977	99,66	220.500.800	205.673.250	93,28
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.480.000	22.480.000	100	44.780.000	44.391.000	99,13
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	19.975.000	99,88	12.000.000	11.997.000	99,97
7	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	49.999.200	100	71.114.500	71.105.900	99,99
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	50.000.000	100	35.000.000	35.000.000	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000	24.763.000	99,05	10.000.000	10.000.000	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	356.746.000	356.611.000	99,96	24.500.000	21.612.000	88,21
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.762.000	19.140.000	87,95	21.762.000	21.612.000	99,60
12	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	29.877.000	99,59
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	406.298.000	406.296.756	100	109.444.259	107.193.419	97,94

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	ke luar daerah						
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	311.875.000	311.543.594	99,89	212.866.629	212.866.000	100
15	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak				704.173.200	688.646.000	97,79
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.712.500.000	2.529.793.807	93,26	40.000.000	40.000.000	100
1	Pembangunan gedung kantor	2.013.000.000	1.860.447.357	92,42			
2	Pengadaan mobil jabatan	461.000.000	439.523.650	95,34			
3	Pengadaan kendaraan	54.000.000	46.179.650	85,52			

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	dinas/operasional						
4	Pengadaan Meubelair	97.500.000	97.158.650	99,65	0	0	0
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.000.000	41.819.500	99,57	10.000.000	10.000.000	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	25.000.000	24.965.000	99,86	25.000.000	25.000.000	100
7	Penataan Taman dan Kebersihan serta kebun hortikultura	20.000.000	19.700.000	98,50	5.000.000	5.000.000	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	127.775.000	124.147.700	97,16			
1	Pengadaan	53.650.000	53.649.850	100			

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	n pakaian olahraga						
2	Pengadaa n pakaian dinas beserta perlengkap annya	74.125.000	70.497.850	95,1 1			
IV	Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.267.000	84.648.673	97,0 0	75.841.000	71.006.195	93,6 3
1	Pendidikan dan pelatihan formal	51.267.000	50.301.173	98,1 2	2.600.000	2.600.000	100
2	Rapat koordinasi perencana an	36.000.000	34.347.500	95,4 1	69.491.000	64.656.195	93,0 4
3	Peningkata n Kapasitas Sistem Perencana				3.750.000	3.750.000	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	an						
V	Program peningkat an pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	360.265.000	348.695.000	96,7 9	129.774.40 0	127.927.50 0	98,5 8
1	Penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja S KPD	9.204.000	9.204.000	100	6.904.000	6.875.600	99,5 9
2	penyusuna n pelaporan keuangan akhir tahun	9.561.000	9.276.100	97,0 2	8.500.000	8.475.500	99,7 1
3	Penyusuna n pelaporan				39.000.000	39.000.000	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Prognosis realisasi anggaran						
4	Penyusunan rka- SKPD	21.550.000	21.550.000	100	18.150.000	16.460.000	90,6 9
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	130.000.000	124.888.000	96,0 7	0	0	0
6	Penyusunan renja SKPD	18.250.000	18.250.000	100	16.466.500	16.466.500	100
7	Penyusunan Renstra SKPD				10.400.000	10.296.000	99,0 0
8	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se- Kalimantan Tengah	171.700.000	165.526.900	96,4 0	30.353.900	30.353.900	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Program Peningkat an Pengemba ngan Pengelola an Aset/Bara ng Daerah	22.650.000	22.650.000	100	17.600.000	16.352.000	92,9 1
1	Pengelolaan inventaris barang daerah	22.650.000	22.650.000	0,00	17.600.000	16.352.000	92,9 1
VII	Program keserasia n Kebijakan Peningkat an Kualitas Anak dan Perempua n	1.648.890.9 00	1.600.476.3 37	97,0 6	406.888.16 4	355.949.34 0	87,4 8
1	Rakorda pembangu nan pemberday aan	200.000.000	197.294.650	98,6 5	34.800.000	31.900.000	91,6 7

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	perempuan dan anak						
2	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab/Kota	0	0	0			
3	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi				0	0	0
4	Rakor Pokja PUG Kab/Kota se-Kalteng	175.000.000	165.331.557	94,4 8			
5	Rapat Koordinasi P2TP2A/P okjatap PkdRT Prov/Kab/K ota se- Kalteng	130.379.500	128.312.610	98,4 1			
6	Rapat Koordinasi Gugus Tugas	0	0	0	0	0	0

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	PHA Tingkat Provinsi						
7	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	300.000.000	291.860.000	97,2 9	75.000.000	66.349.600	88,4 7
8	Rakornas Forum Anak Nasional	300.000.000	299.275.570	99,7 6	0	0	0
9	S osialisasi dan Advokasi Pemenuha n Hak Anak	0	0	0			
10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Gerakan S ayang Ibu	105.504.150	105.303.000	99,8 1	0	0	0
11	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan	57.971.250	57.273.250	98,8 0	50.923.764	50.923.764	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	SayangIbu (GSI) Provinsi,Ka bupaten dan Kota						
12	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	160.036.000	137.579.400	85,9 7	0	0	0
13	Perumusa n dan Penyusuna n Kebijakan Daerah Tentang PHA	0	0	0			
14	Monev PUG di Daerah	120.000.000	119.063.200	99,2 2	1.429.000	1.429.000	100
15	Rapat Forum Gugus				0	0	0

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO)						
16	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (UPTD) PPA Provinsi Kalimantan Tengah				170.000.000	130.611.576	76,83
17	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan Kabupaten /Kota se-				74.735.400	74.735.400	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kalimantan Tengah						
18	Monev Perlindung an Perempua n dan Anak Didaerah	0	0	0			
19	Penyuluhan tentang perlindung an anak dan pencegaha n kekerasan terhadap anak	100.000.000	99.183.100	99,1 8			
VII I	Program Penguata n Kelembag aan Pengarus utamaan Gender dan Anak	111.199.000	110.771.750	99,6 2	52.793.700	47.534.500	90,0 4

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	54.199.000	54.199.000	100,00	52.793.700	47.534.500	90,04
2	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	57.000.000	56.572.750	99,25	0	0	0
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	964.727.600	936.963.690	97,12	84.424.710	84.318.180	99,87
1	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	250.000.000	241.507.140	96,60	78.187.210	78.080.680	99,86

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	67.582.500	67.432.850	99,78			
3	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	449.884.400	433.725.200	96,41			
4	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se Kab/Kota	0	0	0			

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penyediaan Jasa Operasion al Satgas PkdRT (Penyuluhan, dll)	0	0	0			
6	Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A	96.925.000	94.144.000	97,1 3			
7	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempua n dan Anak	40.335.700	40.335.700	100, 00	6.237.500	6.237.500	100
8	Pembinaan terhadap posyandu melalui penguatan gerakan sayang ibu (GSI)	60.000.000	59.818.800	99,7 0	0	0	0
X	Program peningkat an peran serta dan	475.000.000	430.106.200	90,5 5	162.241.40 0	160.737.60 0	99,0 7

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	kesetaraan gender dalam pembangunan						
1	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	230.000.000	192.664.800	83,77	72.717.600	72.717.600	100
2	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	150.000.000	146.619.300	97,75	75.000.000	73.500.000	98,00
3	Capacity Building Bagi Perempuan	50.000.000	45.822.100	91,64	0	0	0

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkata n Kelompok Usaha Perempua n	45.000.000	45.000.000	100, 00	14.523.800	14.520.000	99,9 7
XI	Program Peningkat an Kesejahter aan dan Perlindun gan Anak	436.654.000	431.944.116	98,9 2	48.910.100	48.910.100	100
1	Pelatihan Penangan an Anak Berhadapa n Hukum	0	0	0			
2	Pembentuk an Pokja Anak Berhadapa n Dengan Hukum (ABH)	0	0	0			
3	Seminar dan Penyuluha	157.000.000	154.316.100	98,2 9			

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	n tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga						
4	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	50.000.000	48.449.500	96,9 0	30.510.100	30.510.100	100
5	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten /Kota Layak Anak	229.654.000	229.178.516	99,7 9	18.400.000	18.400.000	100
6	Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)				0	0	0

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	Program Penyusun an Profil Lembaga	379.643.000	372.382.500	98,0 9	55.650.000	55.650.000	100
1	Pengemba ngan S istem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	31.549.700	31.549.100	100, 00	37.200.000	37200.000	100
2	Penyusuna n Buku Data Terpilah Gender dan Anak	113.093.300	108.768.100	96,1 8	0	0	0
3	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	110.000.000	109.475.300	99,5 2	0	0	0
4	Pengemba ngan Layanan Keterbuka				18.450.000	18.450.000	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	an Informasi Publik						
5	Pengemba ngan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokument asi)	125.000.000	122.590.000	98,0 7			
XII	Program Keluarga Berencan a	443.765.500	439.709.579	99,0 9	97.871.500	96.812.095	98,9 2
1	Pelayanan KIE	75.000.000	74.798.250	99,7 3	0	0	0
2	Promosi Kepedulian KB	64.200.000	64.160.000	99,9 4			
3	Promosi Upaya Pendewas aan Usia Perkawina n dan Pengatura	55.365.500	54.663.500	98,7 3	63.449.500	63.449.500	100

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	n Kelahiran Pada Masyaraka t Kab./Kota se- Kalimantan Tengah						
4	Konsultasi/ Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendali an Kuantitas Penduduk	35.000.000	35.000.000	100	19.559.100	18.589.695	94,8 5
5	S inkronisasi Kebijakan Pengendali an Kuantitas Penduduk	0	0	0	14.822.900	14.772.900	99,6 6

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Monev Pelaksana an Kebijakan Pengendali an Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga S ejahtera	150.000.000	148.774.229	99,1 8	0	0	0
7	Pemberda yaan Dan Peningkata n Peran S erta Organisasi Kemasyara katan Dalam Pengelolaa n Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	0	0	0			

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan Kapasitas Bina Ketahanan Remaja dalam Kesehatan Reproduksi Remaja				0	0	0
9	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum keluarga berencana	64.200.000	62.313.600	97,06	0	0	0
XII I	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	168.416.500	162.427.450	96,44			
1	Penyuluhan	168.416.500	162.427.450	96,44			

N O	PROGRA M / KEGIATA N	REALISASI 2019			REALISASI 2020		
		PAGU	KEUANGA N	%	PAGU	KEUANGA N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	penanggulan narkoba dan PMS di sekolah						
XI V	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	0	0	0			
1	Peningkatan Kualitas SDM	0	0	0			
JUMLAH		10.462.196.406	10.051.032.000	96,07	2.879.168.789	2.742.477.644	96,06

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi belanja langsung tahun 2020 sebesar 96,06 % sama dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar 96,07 % Untuk tahun 2020 ada dana Belanja Langsung yang dikembalikan ke negara berjumlah 136.669.145 (3,96 %) dari kegiatan UPT Perlindungan Perempuan Anak dan sisa kegiatan sekretariat yang sudah berjalan 100 % namun demikian tidak menghambat pencapaian output dari kegiatan karena secara fisik terrealisasi 100%.

Untuk Indikator Kinerja sasaran dapat mencapai capaian indicator di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk indikator :

1. Persentase perempuan di lembaga legislatif 31,58 % (100 %)
2. Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga 33,36 % (99,85%).
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan 8,5097 % (100 %)
4. Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar 100 % (100%)
5. Rasio Anak korban kekerasan 1.0083 % (100 %)
6. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart 100 % (100%)
7. Hasil Penilaian SAKIP BB (100%)
8. Angka kelahiran total per WUS 2,24 % (97,76 %)
9. Rata-rata anak jumlah anak perkeluarga 1 % (100 %)

Untuk Indikator Kinerja sasaran tidak dapat mencapai capaian indicator di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk indicator, yaitu :

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi Kalteng 2,57 % (85,67 %)
2. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama tidak ada
3. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki system data gender dan anak 11,11 % (83,34 %)
4. Rasio pemakaian kontrasepsi 0,7985 (90,56%)
5. Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need) 11,31 (50,66)

Dari data 11 (sebelas sasaran) dan 14 (empat belas) indikator yang ada di masa pandemi covid 19 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mencapai target indikator berjumlah 9 (Sembilan) indikator dan 5 (lima) indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2020, berkat dukungan dan komitmen Kabupaten/Kota dan Lintas sector yang terkait dalam pencapaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya perkembangan dukungan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
BTL 2015 - 2020

Belanja Tidak Langsung (BTL)						
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu Anggaran	5.028.078.438	5.977.097.105,10	6.931.201.216	7.313.078.668	7.611.123.080	7.909.105.580
Realisasi	4.875.019.783	5.853.917.664	6.129.066.675	6.458.149.599	5.994.903.731	6.781.556.560
%	96,96	97,94	88,43	88,31	78,77	85,74

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Tabel 3.33
Belanja Langsung (BL) 2015 - 2020

Belanja Langsung (BL)						
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu Anggaran	7.886.000.000	6.387.500.000	5.059.510.000	7.828.755.992	10.462.196.406	2.879.208.780
Realisasi	7.657.996.023	6.226.672.355	4.927.634.188	4.927.634.188	10.051.032.000	2.742.539.640
%	97,11	97,48	97,39	89,37	96,07	95,25

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Pada tahun anggaran 2020 Terdapat 1 (satu) kegiatan dengan tingkat realisasi dibawah 80 persen sebagai berikut :

Tabel 3.34

Realisasi Kegiatan dibawah 80%

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Relisasi	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN			
1	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD) PPA Provinsi Kalimantan Tengah	170.000.000	130.611.576	76,83

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset KB Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Kegiatan “Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD) PPA Provinsi Kalimantan Tengah 76,83 % dengan realisasi fisik 100%, kurang maksimalnya penyerapan belanja pada kegiatan dikarenakan terdapat rekening belanja yang tidak habis terpakai

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan lainnya Rp. 3.683.000 terealisasi Rp. 2.103.000 atau 57,10%
- belanja bahan habis pakai lainnya Rp. 6.450.000 terealisasi Rp. 2.650.000 atau 41,09%
- belanja telepon Rp. 4.800.000 terealisasi Rp. 653.710 atau 13,62%
- belanja jasa service Rp. 14.000.000 terealisasi Rp. 2.561.726 atau 18,30%
- belanja penggantian suku cadang Rp. 6.000.000 terealisasi 1.405.000 atau 23,42%
- belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp.7.950.000 terealisasi 4.362.200 atau 54,87%
- belanja pengadaan Rp.6.789.500 terealisasi 2.893.000 atau 42,61%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik selaras dalam RPJMD 2016 - 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021, maupun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target 9 (Sembilan) indikator dan 5 (lima) indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun keadaan pandemi covid-19. Dengan strategi dan komitmen dan koordinasi yang kuat dengan komunikasi secara digital dan virtual sehingga ada 9 (Sembilan) indikator dapat tercapai .
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik sasaran dan Indikator Kinerja, capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu ke Renstra dan RPJMD 2017-2021.
4. Dengan adanya peraturan gubernur Kalimantan Tengah no 20 tahun 2019 dengan dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kedudukan dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada fungsi pelayanan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya koordinasi kedepannya tapi ada fungsi pelayanan, sehingga pemerintah hadir dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah

5. Realisasi anggaran program kegiatan teknis yang mendukung pencapaian sasaran strategis RENSTRA Tahun 2020 sebesar Rp.2.879.208.789 (96,04%), sedangkan total realisasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 2.742.539.644,-
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melakukan keterbukaan informasi untuk Dokumen Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi capaian di masukkan di **Website DP3APKB** : www.dp3appkb.kalteng.go.id
7. Dengan pencapaian target di 10 (sepuluh) dari 14 (empat belas indikator yang mengacu dengan RENSTRA dan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di Kalimantan Tengah secara Outcome dengan melindungi Perempuan dan Anak dari kekerasan dengan tepatnya pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah dan juga Ketahanan Keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dengan kontrasepsi.
8. Melaksanakan evaluasi dalam bentuk rencana aksi secara berkala terhadap pencapaian target yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK), baik bulanan atau triwulan dan Semester dalam pencapaian keberhasilan Program dan tindak lanjut dalam pencapaian target sasaran dan indikator capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

B. Saran

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup berhasil meskipun ada indikator yang belum tercapai dalam pelaksanaan tugasnya. namun demikian masih banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis RENSTRA dan sumber daya yang dimiliki/mendukung dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembuatan RENSTA yang baru.

2. Perlu adanya SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab dalam mencapai hasil yang maksimal.
3. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih perlu ditingkatkan.
4. Kewenangan yang belum kuat antara fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyangkut Program KB.
5. Perlu peningkatan Kualitas SDM dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
7. Dalam penyusunan RENSTRA yang baru perlu penajaman dalam penentuan sasaran dan Indikator yang ada sesuai Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mendasar pada target dan sasaran kinerja, agar dalam laporan capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP tidak ditemui kendala dalam mengukur capaian kinerja yang tertuang dalam IKU Renstra .

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001

Handwritten signature/initials

Handwritten signature of dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,00
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	persen	28,89
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,41
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0182
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	35,71
		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0182
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	13,33
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+ / BB
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,26
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Rasio	0,829
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	17,02

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.241.526.799	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	90.500.000	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Rp.	22.650.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	430.874.600	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	290.830.480	
6.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp.	1.837.555.171	
7.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	131.801.375	
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	360.514.700	
9.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp.	401.738.125	
10.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Rp.	240.936.000	
11.	Program Penyusunan Profil Lembaga	Rp.	333.872.200	
12.	Program Keluarga Berencana	Rp.	394.218.875	

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112

Telp. 0536 - 3224547

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**
NIP : 19630527 199102 1 001
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001

9/1/20
Elsa



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 Palangka Raya 73112
Telp. 0536 - 3224547

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Unit : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- Tugas dan Fungsi : Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
 - h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
 - i. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - j. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
 - k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
 - l. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	(Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dibagi Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng) dikali 100	DINAS P3APPKB, BAPPEDALitbang, BKAD
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	(Jumlah Perempuan di lembaga legislative (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD)) dikali 100	DINAS P3APPKB, BPS, Sekretariat DPRD
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	(Jumlah Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga dibagi Total Pendapatan) dikali 100	DINAS P3APPKB, BPS
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan) dikali 1000	DINAS P3APPKB (UPT-PPA)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang dilayani sesuai Standar dibagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan) dikali 100	DINAS P3APPKB (UPT-PPA)
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	(Jumlah Kab./Kota Layak Anak dibagi Jumlah Kab./Kota) dikali 100	DINAS P3APPKB
		Rasio anak korban kekerasan	(Jumlah Anak Korban Kekerasan dibagi Jumlah Anak) dikali 1000	DINAS P3APPKB (UPT-PPA)
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	(Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah Anak Korban	DINAS P3APPKB (UPT-PPA)

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
			Kekerasan) dikali 100	
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD) dikali 100	DINAS P3APPKB
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	-	Inspektorat, Biro Organisasi
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi	BPS, BKKBN
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	BPS, BKKBN
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama	BPS, BKKBN
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	(Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (Unmet Need KB) dibagi Total Jumlah PUS) dikali 100	BPS, BKKBN

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2020
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP. 19630527 199102 1 001

Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

- I. Penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai penghargaan atas prestasi dan komitmen dalam menggerakkan Program Pembangunan Keluarga , Kependudukan dan Keluarga Berencana Untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang.



Gubernur Kalimantan Tengah H.SUGINTO SABRAN, mendapatkan penghargaan LENCANA MANGGALA KARYA KENCANA, sebagai bentuk komitmen dalam menggerakkan Program Ketahanan Keluarga , dimana kegigihan dan totalitas Gubernur Kalimantan Tengah diharapkan dari keluarga yang berkualitas bisa menghasilkan generasi penerus yang lebih berkualitas sehingga masa depan Kalimantan Tengah yang lebih maju bisa dirasakan oleh generasi penerus bangsa.

PADA TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MERAH PENGHARGAAN DARI BKKBN PUSAT DALAM PELAYANAN KB SERENTAK SEJUTA AKSEPTOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 346/KK.04.01/F4/HARGANAS Ke-27/2020, Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Juara sebagai Pemenang Terbaik Tingkat Nasional dalam kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor yang dilaksanakan secara Virtual, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diterima yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah adalah Asisten II



**Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan yang diterima
oleh Asisten I**

1. Juara 2 : Target Pelayanan KB 10.000 – 75.000 Akseptor
2. Juara 3 : Provinsi Terbaik Kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor

3. Juara 1 : Target Pelayanan KB 500 – 1500 Akseptor
(Kabupaten Katingan)
4. Juara Harapan : Kabupaten/Kota Terbaik Kegiatan Pelayanan KB
Serentak Sejuta Akseptor Tingkat Nasional
(Kabupaten Katingan)
Untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
5. Juara II : Inovasi Gerakan Cegah Putus pakai Kontrasepsi Pada
masa Pandemi COVID-19



Juara II Tingkat Nasional Untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
Inovasi Gerakan Cegah Putus pakai Kontrasepsi Pada masa Pandemi COVID-19



**Juara 3 Tingkat Nasional Provinsi Terbaik Kegiatan Pelayanan
KB Serentak Sejuta Akseptor**



**Juara 2 Tingkat Nasional Target Pelayanan KB 10.000 –
75.000 Akseptor**

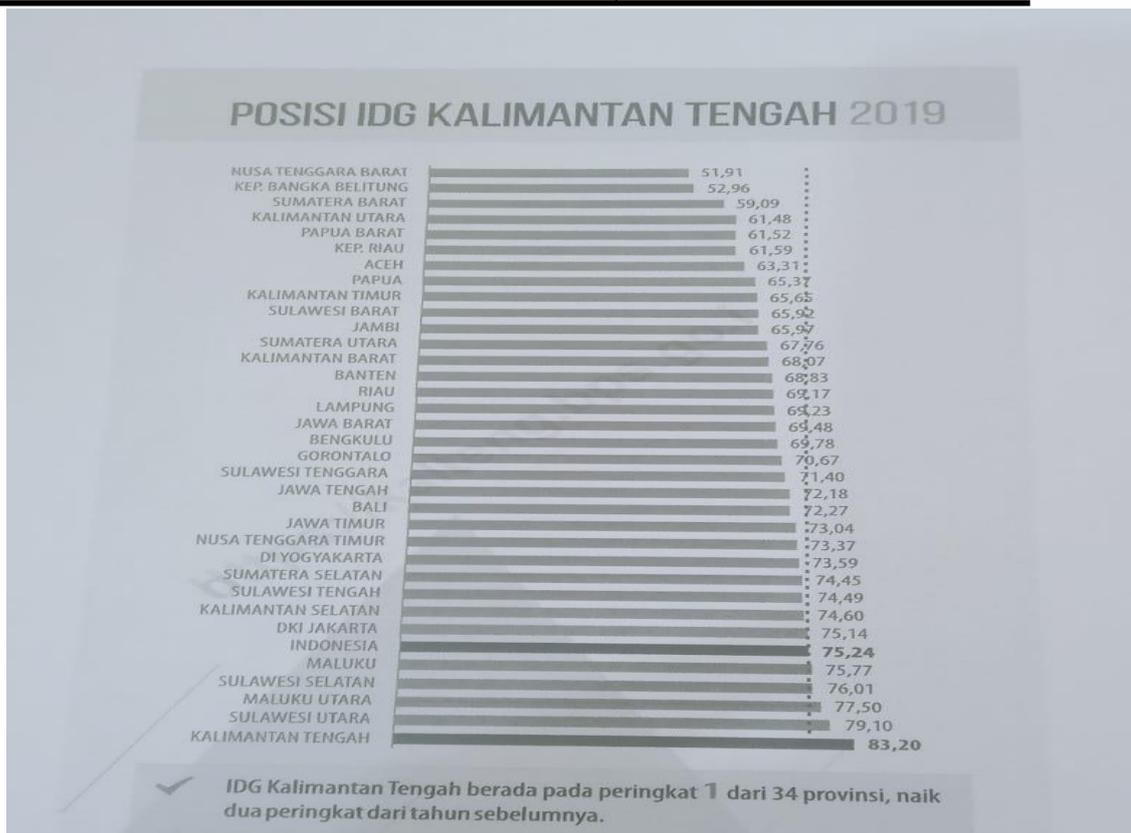


**Juara 1 Tingkat Nasional Untuk Kabupaten Katingan Dalam Target Pelayanan
KB 500 – 1500 Akseptor**



**Juara Harapan II Terbaik Tingkat Nasional Kabupaten/Kota Terbaik Kegiatan
Pelayanan KB Serentak
Sejuta Akseptor Tingkat Nasional**

- II. Kalimantan Tengah Terbaik Nomor 1 di Indonesia . Dalam Indeks Pemberdayaan Gender di Kalimantan Tengah



III. Kalimantan Tengah mendapatkan Penghargaan Perempuan

Inisiator Indonesia dari Kementerian PP dan PA RI Tahun 2020 dalam Rangka Peringatan Hari Ibu ke 92 di Jakarta .

